

WELFARE ECONOMICS

KK
TPS 12/04
Hak.
h

TESIS

**HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM DAN
KEJURUAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN
KELUARGA PETANI, PEDAGANG DAN NELAYAN
DI KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN**

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



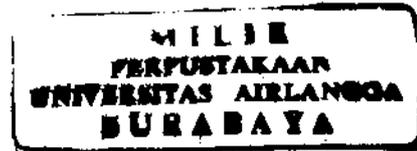
AHMAD KHAIRUL HAKIM

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2003

**HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM DAN
KEJURUAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN
KELUARGA PETANI, PEDAGANG DAN NELAYAN
DI KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN**

TESIS



**Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Pengembangan SDM
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**



Oleh :

**AHMAD KHAIRUL HAKIM
NIM. 090013985 M**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Pada Tanggal 7 Pebruari 2003

Oleh
Pembimbing Ketua

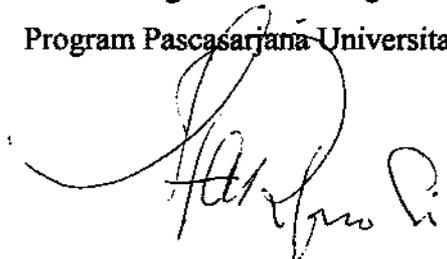
Prof. H. Kuntoro, dr., MPH, Dr.PH
NIP. 130531767

Pembimbing


H. Sugiri Syarif, dr., MPA
NIP. 140097168

Mengetahui

Ketua Program Studi Pengembangan SDM
Program Pascasarjana Universitas Airlangga


Prof. H. Haryono Suyono, MA., Ph.D

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Telah diuji pada:

Kamis, 27 Pebruari 2003

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. H. Haryono Suyono, MA., Ph.D.

Anggota : 1. Prof. Eddy Pranowo Soedibjo, dr., MPH

2. Prof. H. Kuntoro, dr., MPH, Dr.PH

3. Dr. Sunarjo, dr., MS., MSc.

4. H. Sugiri Syarif, dr., MPA

5. Drs. Ida Bagus Wirawan, SU



UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini walau dengan segala keterbatasan. Sudah barang tentu tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, niscaya tesis ini tidak akan pernah terwujud. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. H. Kuntoro, dr., MPH., Dr.PH. selaku pembimbing ketua yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
2. H. Sugiri Syarif, dr., MPA. Selaku pembimbing yang memberikan saran-saran perbaikan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang telah memberikan bantuan beasiswa sehingga meringankan beban dalam menyelesaikan studi ini.
4. Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan pada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Magister di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
5. Direktur, Asisten Direktur, dan seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan, pelayanan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan Program Magister Pengembangan Sumber Daya manusia di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
6. Prof. H. Haryono Suyono, MA., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah banyak memberikan masukan mengenai pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
7. Segenap dosen program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama menempuh pendidikan.
8. Rekan-rekan mahasiswa PSDM angkatan 2000 terutama minat studi Keluarga dan Masyarakat; Nanda, Arin, Yuli, Irma S dan Ibu Imma yang telah memberikan semangat serta kebersamaan dalam menempuh pendidikan di Program Magister Universitas Airlangga.
9. Ayahanda Drs. H. Dimiyati Abdullah dan Ibunda Hj. Siti Karimah serta saudara-saudara tercinta yang telah memberikan semangat dan doa terus-menerus hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat magister ini.
10. Mas Teddy Atmajaya dan Irawadhi Irawan yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

11. Semua pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Akhirnya dengan iringan doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis. Harapan penulis, semoga tesis dengan segala keterbatasan dan kekurangannya ini dapat berguna bagi peningkatan kesejahteraan keluarga, serta bermanfaat untuk almamater, masyarakat, dan bangsa yang sedang melaksanakan pembangunan ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita dan tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua, Amin Ya Rabbal Alamin.

Surabaya, Pebruari 2003

Penulis





RINGKASAN

RINGKASAN

Penelitian tentang hubungan antara tingkat pendidikan menengah umum dan kejuruan dengan tingkat kesejahteraan keluarga yang mengambil lokasi di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ini secara umum bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kesejahteraan pada keluarga petani, pedagang, dan nelayan. Lebih jauh penelitian ini ingin menganalisis apakah terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan keluarga yang berpendidikan menengah umum dengan yang berpendidikan menengah kejuruan serta menjelaskan sejauh mana mereka memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam menunjang pekerjaannya.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah *pertama*, terdapat hubungan antara tingkat pendidikan menengah umum dan kejuruan dengan tingkat kesejahteraan keluarga petani, pedagang, dan nelayan. *Kedua*, tingkat kesejahteraan keluarga dengan kepala keluarga yang berpendidikan menengah kejuruan lebih sejahtera daripada yang berpendidikan menengah umum.

Sampel penelitian ini adalah 90 keluarga yang terdiri dari 56 orang berpendidikan menengah umum dan 34 berpendidikan menengah kejuruan. Untuk membuktikan hipotesis pertama, digunakan uji Eksak Fisher. Sedangkan untuk membuktikan hipotesis kedua digunakan uji Mann-Whitney.

Hasil pengujian pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$ dengan uji Eksak Fisher menunjukkan $p < \alpha$ pada masing-masing kelompok profesi. Tingkat signifikansi pada masing-masing kelompok profesi tersebut adalah petani = 0.018, pedagang $p = 0.001$, dan nelayan $p = 0.01$. Ini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dengan menggunakan uji Mann-Whitney diperoleh tingkat signifikansi 0.00 ($p < 0.05$) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan antara kelompok keluarga yang berpendidikan menengah umum dengan kelompok keluarga yang berpendidikan menengah kejuruan. Dilihat dari rata-rata peringkatnya, kelompok yang berpendidikan menengah kejuruan lebih besar daripada kelompok yang berpendidikan menengah umum yakni $59.21 > 7.18$. Ini berarti kelompok kejuruan lebih sejahtera dari pada kelompok umum. Dengan demikian pada hipotesis kedua ini H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Pengetahuan dan keterampilan yang diterima oleh kepala keluarga diterapkan dalam pekerjaannya sehari-hari, walaupun apa yang diterima mereka masih dirasa kurang dalam membantu meningkatkan keahlian mereka dalam pekerjaannya. Sehubungan dengan hal itu perlulah kiranya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan penyuluhan, pemberian keterampilan dan mengoptimalkan lembaga pendidikan kejuruan atau balai latihan kerja.



ABSTRACT

ABSTRACT

The research concerns about the prosperity of a family based on the level of education of family. This research has purpose to analyse the correlation between education and the family welfare of farmer, merchant, and fisherman. More over, the research does not only describe whether there is difference in the level of education toward the family welfare but also explains how they apply their knowledge and skill in their job. It was conducted at Pademawu, Pamekasan.

There are two hypotheses which are applied in this research. First, there is a correlation between the level education, vocational school and senior high school graduates, toward the family welfare. Second, the welfare of the head of family who graduate from vocational school are better than they who graduate from senior high school.

The sample are 90 families. They consist of 56 senior high school graduates and 34 vocational school graduates. In order to prove the hypothesa, the process of data use Fisher's Exact Test. Meanwhile, in order to prove the second hypothesis, Mann-Whitney test are used to process the data.

The result of research in significant level $\alpha = 0.05$ with Fisher's Exact Test shows $p < \alpha$ in each group of job. The level of significant for each group is farmer = 0.018, merchant = 0.001, and fisherman = 0.01. It means that H1 is accepted and H0 is rejected. By using Mann-Whitney Test is gained the level of significant 0.00 ($p < 0.05$) which shows the differences of family welfare between them who graduate from vocational school and senior high school. For those who graduate from senior high school are bigger than they who graduate from senior high school in mean rank, $59.21 > 7.18$. It means that the first group are better than another group in the family welfare.

Eventhough the knowledge and skill which are gained are limited but those can develop their job ability. In order to enrich knowledge and skill, the institution should make corses and illuminations, and optimalizẽ the vocational education departement. By using this way, the graduates are hoped to master better knowlwdge and skill which can help them in job.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Prasyarat Gelar	iii
Persetujuan	iv
Penetapan Panitia	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Ringkasan	viii
Abstract	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.3.1. Tujuan Umum	10
1.3.2. Tujuan Khusus	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Penelitian Terdahulu	13
2.2. Konsep Pendidikan	14
2.2.1. Teori Pendidikan	16
2.2.2. Teori Fungsi-Teknis Pendidikan	17
2.2.3. Pengertian Pendidikan	25
2.2.4. Manfaat Pendidikan	28
2.2.5. Jalur dan Jenis Pendidikan	29
2.2.6. Pendidikan Menengah	30

2.3. Konsep Keluarga Sejahtera	35
2.3.1. Pengertian Keluarga Sejahtera	39
2.3.2. Indikator Keluarga Sejahtera.....	42
2.3.3. Aplikasi Indikator Keluarga Sejahtera	45
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	47
3.1. Kerangka Konseptual	47
3.2. Hipotesis Penelitian	49
BAB IV METODE PENELITIAN	50
4.1. Rancangan Penelitian	50
4.2. Lokasi Penelitian	50
4.3. Penentuan Populasi dan Sampel	50
4.3.1. Populasi	50
4.3.2. Sampel	51
4.4. Identitas Variabel	51
4.5. Definisi Operasional	55
4.6. Instrumen Penelitian	55
4.6.1. Penentuan Skor	55
4.6.2. Validitas Instrumen Penelitian	56
4.6.3. Reliabilitas Instrumen Penelitian	57
4.7. Prosedur Pengumpulan Data	57
4.7.1. Jenis dan Sumber Data	57
4.7.2. Cara Pengumpulan Data	58
4.8. Cara Pengolahan dan Analisis Data	58
BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	60
5.1. Hasil Penelitian	60
5.1.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	60
5.1.2. Deskripsi Responden Penelitian	65
5.2. Uji Validitas dan Reliabilitas	68
5.2.1. Uji Validitas	68
5.2.2. Uji Reliabilitas	69
5.3. Analisis Hasil Penelitian	69
5.3.1. Hasil Uji Eksak Fisher	69
5.3.2. Hasil Uji Mann-Whitney	72
5.4. Pengetahuan dan Keterampilan Petani, Pedagang, dan Nelayan ..	73
BAB VI PEMBAHASAN HASIL ANALISIS	78
6.1. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan dengan Tingkat Kesejahteraan Keluarga	78

6.2. Perbedaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Antara Kelompok Keluarga yang Berpendidikan Umum dan Kejuruan	80
6.3. Pengetahuan dan Keterampilan Dalam Menunjang Pekerjaan	81
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	83
7.1. Kesimpulan	83
7.2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
4.1	Definisi Operasional	55
5.1	Jumlah penduduk menurut agama yang dianut	60
5.2	Distribusi sarana ibadah	61
5.3	Distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan	61
5.4	Distribusi sarana pendidikan	62
5.5	Distribusi fasilitas kesehatan	62
5.6	Distribusi penduduk menurut mata pencaharian	63
5.7	Klasifikasi Keluarga Sejahtera	64
5.8	Jumlah responden berdasarkan kelompok umur	65
5.9	Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin	66
5.10	Jumlah responden berdasarkan jenis pendidikan	66
5.11	Jumlah responden berdasarkan pendapatan	67
5.12	Jumlah responden berdasarkan tanggungan anak	67
5.13	Hasil uji validitas	68
5.14	Hasil uji Eksak Fisher pada keluarga petani	69
5.15	Hasil uji Eksak Fisher pada keluarga pedagang	70
5.16	Hasil uji Eksak Fisher pada keluarga nelayan	71
5.17	Hasil uji Mann-Whitney tentang perbedaan tingkat kesejahteraan ...	72
5.18	Tabel sumber pengetahuan dan keterampilan responden	73
5.19	Tabel perbandingan sumber pengetahuan dan keterampilan	74



DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
3.1	Kerangka Konseptual	48





DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	Kuesioner	88
Lampiran 2:	Reliability	92
Lampiran 3:	Crosstab	93
Lampiran 4:	Npar Test	94





BAB I

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan penduduk pedesaan di Indonesia sampai saat ini sebagian besar masih ditopang dari kegiatan pertanian. Keterpurukan perekonomian secara nasional ternyata semakin menekan kehidupan sosial ekonomi petani di pedesaan, meskipun dampak dari kejayaan perekonomian secara nasional sebenarnya belum sempat menyentuh kehidupan petani secara substansial. Kejayaan perekonomian nasional mengalami tekanan sejak medium 1997 hingga saat ini. Upaya pemulihan terus dilakukan meskipun belum mampu secara signifikan membangkitkan pertumbuhan perekonomian. Kondisi yang memprihatinkan ini semakin diperparah dengan keharusan menanggung dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan akhir-akhir tahun ini karena sarana produksi harus diperoleh dengan harga yang semakin sulit dijangkau. Pedesaan menjadi wilayah yang semakin marginal dengan sumber daya yang semakin terbatas dan kurang dimanfaatkan secara optimal.

Penduduk miskin di pedesaan tahun 1996 tinggal 15,3 juta jiwa. Ternyata pada tahun 1998 (satu tahun setelah krisis ekonomi) meningkat menjadi 56,8 juta. Berarti penduduk miskin secara nasional pada tahun 1996 yang tinggal 15 persen

pada tahun 1998 menjadi 80 persen penduduk yang harus terperangkap dalam kemiskinan (BPS, 1996).

Seperi dikatakan oleh Lerner (1980), tersedjanya sarana dan prasarana seperti jalan, transportasi di samping listrik, merupakan faktor penting bagi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat desa. Dengan tersedianya sarana perhubungan dan transportasi serta komunikasi, pengaruh dunia luar, seperti program-program pembangunan pemerintah, dapat dengan cepat sampai kepada suatu masyarakat. Dan, perubahan seperti itu memang terjadi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa dengan adanya sarana dan prasarana tersebut di atas tingkat kemakmuran penduduk secara otomatis menjadi meningkat.

Dwiatmoko dan Djatmiko (Mubyarto, dkk: 1994) mengungkapkan bahwa tersedianya sarana dan prasarana di atas belum mampu membebaskan masyarakat pedesaan dari kungkungan kemiskinan. Lebih dari 10 tahun setelah sarana perhubungan dan transportasi dibangun, banyak penduduk pedesaan yang tetap miskin. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya alam, kondisi geografis (keadaan alam) yang berat, khususnya akibat struktur tanah berupa batu cadas bercampur kapur, dan terbatasnya air, baik untuk pertanian maupun untuk kebutuhan sehari-hari, telah menyebabkan hasil pertanian kurang berarti bagi sumbangan pendapatan keluarga. Lebih jauh dari hasil penelitian tersebut terungkap bahwa 30% penduduk masih miskin dengan pendapatan apabila dikonversikan dengan beras, kurang dari 380 kg per kapita per tahun. Sepertiga dari jumlah tersebut bahkan miskin

sekali, atau pendapatannya apabila dikonversikan dengan beras, kurang dari 240 kg beras.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam keluarga, khususnya mengenai jumlah anggota dalam sebuah keluarga, sesungguhnya memiliki pengaruh yang amat besar terhadap dinamika dalam institusi keluarga itu sendiri. Tidak hanya persoalan ekonomi, seperti semakin kecilnya tingkat konsumsi atau pengeluaran saja. Namun, perubahan jumlah anggota keluarga juga terkait dengan persoalan-persoalan kesehatan yakni semakin terjaminnya gizi keluarga dan perawatan di bidang kesehatan. Di bidang pendidikan dan pembinaan mental anak, semakin kecil jumlah anggota keluarga dimungkinkan semakin banyak waktu dan intensitas perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Bahkan, jika jika terdapat kelebihan waktu dan ada kesempatan, orang tua dapat mempergunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya seperti mencari tambahan penghasilan, menambah keterampilan dengan kursus-kursus, aktivitas sosial maupun manfaat kemasyarakatan lainnya yang sangat berarti untuk menambah kesejahteraan keluarga (Suparto, 1992). Ilustrasi ini secara teoritis sesungguhnya ingin mengungkapkan bahwa besar kecilnya anggota keluarga, bentuk keluarga serta struktur keluarga, memiliki kaitan yang erat dengan persoalan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, kesejahteraan bahkan persoalan kultur.

Meningkatnya pelayanan pendidikan, kesehatan, Keluarga berencana, transmigrasi, bantuan dan kesejahteraan sosial oleh pemerintah bagi penduduk dan keluarga, merupakan peluang yang sangat besar bagi peningkatan mutu keluarga

menuju keluarga sejahtera. Pendidikan merupakan interaksi manusia dengan lingkungannya termasuk lingkungan alam dan lingkungan manusia. Di dalam interaksi tersebut manusia bukan hanya hasil interaksi dengan alamnya dan dengan sesama manusianya, tetapi juga adalah pelaku aktif di dalam interaksi tersebut (Tilaar, 2000: 55). Oleh sebab itu proses pendidikan haruslah diarahkan agar potensi yang ada pada anak manusia tersebut dikembangkan seoptimal mungkin sesuai dengan fitrahnya, dia dapat menyumbangkan kemampuannya untuk pengembangan dirinya, pengembangan masyarakatnya, dan seterusnya untuk negaranya, serta kehidupan umat manusia pada umumnya. Di dalam proses pemberdayaan anak manusia tentunya diperlukan berbagai prasyarat serta prasarana di dalam melaksanakannya. Pertama-tama tentunya lingkungan kehidupan anak manusia harus memberikan untuk pengembangan potensinya. Lingkungan tersebut hendaknya memberikan kesempatan kepada perkembangan anak manusia agar dia tidak terkungkung atau dibatasi oleh suatu tujuan yang telah direkayasa. Seseorang haruslah diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada padanya.

Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Seperti yang dinyatakan dalam GBHN, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusianya, yaitu dapatnya dipenuhi hajat hidup, jasmaniah dan rohaniah, sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan

makhluk religius, agar dengan demikian dapat meningkatkan martabatnya selaku makhluk. Jika pembangunan bertolak dari sifat hakikat manusia, berorientasi kepada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia maka dalam ruang gerak pembangunan, manusia dapat dipandang sebagai objek dan sekaligus juga sebagai subjek pembangunan.

Sebagai objek pembangunan manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini pembangunan meliputi iktiar ke dalam diri manusia, berupa pembinaan pertumbuhan jasmani, dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif serta keterampilan kerja. Iktiar ini disebut pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur kesejahteraan manusia dan keberhasilan pembangunan suatu bangsa, yang tidak bisa dilepaskan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah menekankan adanya pemenuhan kebutuhan pendidikan sebagai prioritas utama, terutama pendidikan tingkat dasar, sehingga mendorong untuk pembangunan fasilitas pendidikan dasar ini di setiap pelosok tanah air. Sementara itu keberhasilan pendidikan dasar menuntut adanya pemenuhan kebutuhan pendidikan lanjutan. Sangat ironis apabila pemerintah gencar meningkatkan pendidikan, namun masyarakat pedesaan belum dapat menikmati hasil pembangunan tersebut (Mubyarto, dkk: 1992).

Pendidikan bagi seseorang (individu) sangat penting, karena dengan pendidikan individu akan memperoleh pengetahuan yang diinginkannya. Akan tetapi, tinggi-rendahnya tingkat pendidikan individu dipengaruhi oleh banyak faktor,

di mana salah satunya adalah keadaan ekonomi keluarga. Semakin mampu ekonomi keluarga, maka akan semakin tinggi tingkat pendidikan yang diterima oleh anggota-anggota keluarga tersebut. Demikian pula halnya dengan pentingnya pendidikan bagi masyarakat pedesaan. Semakin tinggi pendidikan yang diterima oleh anggota keluarga, maka akan dapat menaikkan status sosial atau harkat anggota keluarga di dalam komunitasnya.

Untuk mengembangkan potensi yang ada perlu suatu sarana yang memadai agar tujuan itu tercapai, misalnya dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mereka. Ini bisa ditempuh misalnya dengan memasukkan suatu kurikulum pengajaran yang sesuai pada lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menggali potensi yang ada dan mengembangkannya. Sementara ini nampaknya pendidikan menengah belum mampu menjawab tantangan itu. Tingkat pengangguran tamatan sekolah menengah menunjukkan angka 12% untuk tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK), ditambah lagi dengan tingkat pengangguran tamatan sekolah menengah umum (SMU) sebanyak 18% (SUPAS 1995). Ini berarti menunjukkan bahwa lulusan sekolah menengah kejuruan lebih siap memasuki dunia kerja dibandingkan dengan lulusan sekolah menengah umum.

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000 diperoleh data bahwa sekitar 62,83% penduduk Pamekasan adalah petani dari seluruh penduduk yang berjumlah 688.380 jiwa. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari penduduk di daerah ini berprofesi sebagai petani. Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar daerah digunakan sebagai lahan pertanian. Namun demikian rata-rata tanah pertanian yang

digunakan oleh petani hanya mampu memproduksi satu kali dalam satu musim. Pada musim penghujan petani bercocok tanam padi hanya sekali pada musim itu sedangkan pada musim kemarau petani menanam tembakau. Dengan demikian berarti bahwa petani mempunyai kesempatan kerja pada lahapnya hanya dua kali dalam setahun.

Hasil pendataan keluarga tahun 2001 BKKBN Kabupaten Pamekasan menyebutkan bahwa sebanyak 76.641 keluarga merupakan keluarga pra sejahtera. Ini berarti menunjukkan bahwa 42% dari 181.532 keluarga di Pamekasan terbelenggu dalam kemiskinan. Selanjutnya sebanyak 49.387 (27%) dan 34.104 (19%) keluarga secara berturut-turut merupakan Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II sementara Keluarga Sejahtera III berjumlah 17.673 keluarga atau sekitar 10%. Sedangkan Keluarga Sejahtera III Plus hanya berjumlah 2% dari seluruh keluarga yang terdapat di kabupaten ini atau sekitar 3.727 keluarga. Berdasarkan hasil pendataan keluarga sampai pada tahun 2001 di atas menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga di Pamekasan masih dalam taraf yang memprihatinkan.

Sementara itu dalam wilayah Kecamatan Pademawu hasil pendataan keluarga tahun 2001 oleh BKKBN setempat menyebutkan bahwa keluarga pra sejahtera mencapai 7.126 keluarga atau sekitar 40,1%. Sebanyak 4.213 atau 23,7% keluarga merupakan Keluarga Sejahtera I dan 2.989 (16,8%) keluarga termasuk golongan Keluarga Sejahtera II. Adapun yang termasuk golongan Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus berturut-turut sebanyak 2.855 dan 573 keluarga atau sekitar 16,1% dan 3,3%.

Dari 17.756 keluarga di wilayah Kecamatan Pademawu tersebut di atas, sebanyak 4425 atau sekitar 24,92% berpendidikan menengah atas. Dari sejumlah keluarga yang berpendidikan menengah atas tersebut terbagi atas 2761 atau sekitar 62,4% berpendidikan menengah umum dan selebihnya 37,6% atau sebanyak 1664 keluarga yang berpendidikan sekolah menengah kejuruan. Pada keluarga yang berpendidikan menengah umum masing-masing tergolong dalam tahapan keluarga sejahtera yakni Keluarga Pra Sejahtera 249 keluarga (9%), Keluarga Sejahtera I adalah 690 keluarga (25%). Keluarga Sejahtera II dan III sebanyak 1215 keluarga (44%) dan 469 keluarga (17%), sedang Keluarga Sejahtera III Plus sebanyak 138 keluarga atau sekitar 5%. Sedangkan pada keluarga yang berpendidikan menengah kejuruan, Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 3% atau 50 keluarga, Keluarga Sejahtera I 12% atau 200 keluarga dan Keluarga Sejahtera II 616 keluarga atau 37%. Pada Keluarga Sejahtera II dan III Plus sejumlah 482 (29%) dan 316 (19%) keluarga.

Dari data di atas terlihat bahwa yang tergolong keluarga miskin (Pra Sejahtera dan Sejahtera I) lebih banyak dari keluarga yang berpendidikan menengah umum daripada yang berpendidikan menengah kejuruan. Demikian pula dengan keluarga sejahtera baik II, III ataupun III Plus, dibandingkan dengan keluarga yang berpendidikan menengah umum, keluarga yang berpendidikan menengah kejuruan lebih banyak.

Lembaga pendidikan menengah atas baik umum maupun kejuruan yang ada di Kabupaten Pamekasan sebanyak 18 lembaga, 11 di antaranya berada di Kecamatan Pamekasan sementara yang lain tersebar di 11 kecamatan lainnya. Dari 18 lembaga

pendidikan menengah atas tersebut 4 di antaranya merupakan pendidikan menengah atas kejuruan. Selain lembaga pendidikan menengah umum dan kejuruan, terdapat pula pendidikan menengah setingkat itu yakni pendidikan menengah keagamaan. Pendidikan menengah keagamaan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan. Jumlah lembaga pendidikan menengah keagamaan ini relatif lebih banyak daripada lembaga pendidikan menengah umum maupun kejuruan yakni sekitar 20 lembaga yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dilihat dari jumlah lembaga pendidikan menengah di atas dapat dikatakan bahwa sarana pendidikan bagi masyarakat Pamekasan cukuplah memadai dalam rangka pemerataan pendidikan.

Dari data yang ada menunjukkan bahwa keluarga yang berpendidikan menengah kejuruan sebagian lebih sejahtera dibandingkan yang berpendidikan menengah umum. Apakah hal ini lebih disebabkan karena keluaran sekolah menengah kejuruan telah dibekali dengan pengetahuan semasa menempuh pendidikan yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu dapat digunakan untuk siap memasuki lapangan kerja dibandingkan dengan sekolah menengah umum yang dibekali ilmu dengan mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa agar dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataukah disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Akan

tetapi yang pasti bahwa pembekalan pengetahuan yang berbeda tujuan itulah yang bisa saja menyebabkan kesiapan mereka dalam bekerja berbeda pula.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara pendidikan menengah umum dan kejuruan dengan tingkat kesejahteraan keluarga petani, pedagang dan nelayan?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan keluarga petani, pedagang, dan nelayan antara kepala keluarga yang berpendidikan menengah umum dan kejuruan?
3. Apakah tingkat kesejahteraan keluarga dengan kepala keluarga berpendidikan menengah kejuruan lebih sejahtera daripada yang berpendidikan menengah umum?
4. Bagaimanakah para kepala keluarga memanfaatkan pengetahuan yang didapat dalam menunjang pekerjaannya?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis hubungan antara pendidikan menengah umum dan kejuruan dengan tingkat kesejahteraan keluarga petani, pedagang dan nelayan.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Menganalisis apakah terdapat hubungan antara pendidikan menengah umum dan kejuruan dengan tingkat kesejahteraan keluarga petani, pedagang dan nelayan.
2. Menganalisis apakah terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan keluarga petani, pedagang dan nelayan yang berpendidikan menengah umum dan kejuruan.
3. Menganalisis apakah tingkat kesejahteraan keluarga dengan kepala keluarga berpendidikan menengah kejuruan lebih sejahtera daripada yang berpendidikan menengah umum.
4. Menjelaskan sejauh mana kepala keluarga memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diterima dalam menunjang pekerjaannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi dunia ilmu pengetahuan, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemerayaan informasi tentang hubungan antara tingkat pendidikan menengah umum dan kejuruan dengan tingkat kesejahteraan petani, pedagang, dan nelayan.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah kabupaten Pamekasan dalam mengambil kebijakan guna membina dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

3. Sebagai bahan masukan bagi penyelenggara pendidikan guna memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta didik yang dapat digunakan bagi kehidupan praktis mereka.
4. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti lain yang berminat terhadap masalah peningkatan kesejahteraan keluarga petani, pedagang, dan nelayan.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai sumber acuan dan informasi yang sangat bermanfaat dalam membahas hasil penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yaitu penelitian yang pernah dilakukan adalah:

Budiman Christiananta dalam *Human Investment Through Education and Its Impact on Earnings* menyatakan bahwa:

1. Grafik profil pendapatan hasil penelitian di Indonesia berbentuk cekung dari bawah, konsisten dengan ciri-ciri universal yang disebutkan oleh M. Blaug (1976) dan Psacharopoulos (1973) bahwa tingkat pendidikan seseorang berkorelasi secara positif dengan pendapatan diperolehnya.
2. Faktor pendidikan memberi sumbangan positif kepada faktor pengalaman kerja dalam hubungannya dengan pendapatan.
3. Faktor pengalaman kerja juga memberi sumbangan positif kepada faktor pendidikan dalam hubungannya dalam pendapatan.
4. Dampak faktor pendidikan terhadap pendapatan yang tampak positif pada masa kerja yang meningkat, juga dapat berarti bahwa dampak tadi bagi kohort tenaga kerja yang relatif baru justru menurun. Hal ini berarti terjadi perubahan hubungan antara pendidikan dengan jenis pekerjaan yaitu berupa meningkatnya tingkat

pendidikan yang disyaratkan oleh penguasa untuk pekerjaan serupa dan lebih banyaknya tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tertentu yang bersedia menerima pekerjaan yang lebih rendah sehingga alokasi dana untuk investasi di bidang pendidikan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sementara Rahmawati (1997) dalam *Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Strata Keluarga Sejahtera Petani* mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan yang diraih oleh seorang petani akan mempengaruhi tingkat kesejahteraannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang petani maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarganya. Namun demikian ada beberapa kasus walaupun pendidikan seorang petani rendah atau tidak tinggi, namun tingkat kesejahteraannya cukup baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya penguasaan luas lahan, faktor pekerjaan, jumlah anak yang ditanggung, kondisi kesehatan, penguasaan teknologi, transportasi dan komunikasi, usia perkawinan keluarga, warisan yang dimiliki dari orang tuanya, dan sebagainya.

2.2. Konsep Pendidikan

Dalam khasanah Ilmu Pendidikan bahwa tugas mulia pendidikan terletak pada upaya pengembangan aspek-aspek pribadi manusia baik jasmani maupun ruhani. Pengembangan tersebut pada intinya tidak terlepas dari kenyataan diri dan lingkungan seseorang. Karena itu, salah satu upaya pendidikan pada hakikatnya diharapkan menampakkan diri dalam bentuk terwujudnya pribadi yang sesuai dengan kenyataan diri dan lingkungan seseorang. Hal tersebut berarti bahwa upaya

pendidikan senantiasa mengabdikan pada kepentingan lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budayanya. Dengan kata lain bahwa upaya pendidikan di sini bertujuan untuk terbentuknya manusia yang mampu membudayakan manusia baik jasmani maupun ruhaninya dalam menyesuaikan diri secara aktif dalam kehidupannya.

Upaya pendidikan bagi negara-negara yang tergolong negara berkembang contohnya negara Indonesia dipandang sebagai alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga ahli yang terampil di dalam melaksanakan tugas di segala sektor pembangunan. Kekayaan alam yang kita miliki sangat mengandung arti bagi kesejahteraan hidup manusia apabila tersedianya tenaga ahli. Karena pendidikan itu sendiri merupakan sarana potensial di dalam meningkatkan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik.

Pendidikan dalam berbagai program mempunyai peranan penting dalam proses memperoleh dan meningkatkan kualitas kemampuan profesional individu. Melalui pendidikan, seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berpikir secara sistematis agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan di kemudian hari. Hal tersebut nantinya akan tampak pada kinerjanya, yang pada akhirnya akan menjamin produktivitas kerja yang semakin meningkat.

Pendidikan merupakan suatu proses interaksi dan interrelasi antar komponen pendidikan, dalam suatu proses integral, menyeluruh, dan mempunyai tujuan khusus yang telah ditetapkan (Wirojoedo, 1986: 3). Notonagoro menyatakan bahwa

pendidikan berisi tentang kenyataan dan kebenaran. Kenyataan, karena ia berisi *transfer of value*, nilai itu merupakan seperangkat unsur-unsur/elemen/gatra yang selaras dan serasi dalam suatu kesatuan yang organis. Nilai-nilai dalam kenyataan ini digarap oleh aksiologi. Pengertian *transfer of value* ini diartikan sebagai warisan kebudayaan dari generasi tua ke generasi yang lebih muda tentu dalam hubungan tanggung jawab. Pendidikan sebagai bantuan yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab pada si terdidik ini sesuai dengan pandangan Langeveld (1971) yang memberikan pengertian yang cukup esensi tentang masalah pendidikan dengan suatu kondisi atau suasana pendidikan, di mana proses itu direncanakan adanya dan dengan tujuan yang jelas dan pasti. Jadi pendidikan terjadi bila ada situasi pendidikan di mana proses itu direkonstruksi. Sebenarnya, rumusan itu tidak lepas dari landasan pemikiran, cara pandang maupun pandangan tentang manusia, dengan istilah *animal educantum* atau *animal educable*.

2.2.1. Teori Pendidikan

Pembahasan tentang pentingnya pendidikan dalam menunjang pekerjaan seseorang, sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun, untuk kepentingan penelitian ini dikemukakan pemikiran dari Collins (dalam Karabel dan Halsey, 1978: 118-133), karena teori yang dikemukakan olehnya terkesan lebih menyeluruh.

Diakui bahwa pendidikan sangat berperan dalam memperoleh dan menunjang pekerjaan di masyarakat. Oleh karena itu pendidikan kemudian menjadi studi yang menempati posisi penting dalam analisis stratifikasi dan mobilitas sosial.

Teori yang dibahas oleh Collins untuk memahami hubungan antara pendidikan dan pekerjaan dalam kaitannya dengan stratifikasi dan mobilitas sosial adalah: (1) teori fungsional yang mempunyai perhatian pada upaya masyarakat industri untuk memenuhi persyaratan akan kebutuhan tenaga-tenaga berketerampilan teknis; (2) teori konflik (diturunkan dari pendekatan Max Weber), yang menetapkan beberapa faktor penentu sebagai akibat dari bermacam-macam perjuangan di berbagai kelompok status. Kedua teori atau pendekatan itu digunakan Collins untuk menganalisis fenomena peranan pendidikan dalam perolehan pekerjaan di masyarakat Amerika modern. Dalam hal ini akan dipaparkan secara ringkas teori fungsi-teknis sebagaimana berikut:

2.2.2. Teori Fungsi-Teknis Pendidikan

Pemikiran mengenai pentingnya pendidikan dalam masyarakat mungkin dihasilkan oleh teori fungsi-teknis pendidikan. Proposisi dasar, yang ditemukan dari sejumlah sumber, dinyatakan sebagai berikut:

1. Persyaratan atau kebutuhan keterampilan pada beberapa pekerjaan secara konstan meningkat karena perubahan teknologi. Dua proses yang terlibat dalam hal itu ialah: (a) Perbandingan pada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan rendah menurun, dan perbandingan pada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi meningkat; (b) Pekerjaan-pekerjaan yang sama ditingkatkan melalui persyaratan keterampilan.

2. Pendidikan formal memberikan pelatihan, baik dalam keterampilan yang khusus atau dalam bentuk kemampuan umum, karena diperlukan untuk jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian lebih tinggi.
3. Oleh karena itu, kebutuhan akan pendidikan untuk pekerjaan, secara konstan meningkat sedangkan jumlah penduduk juga semakin besar, sehingga mereka dituntut untuk belajar lebih panjang dengan waktu yang lebih lama di sekolah.

Teori fungsi-teknis pendidikan mungkin dapat dilihat sebagai penerapan khusus dari pendekatan fungsional yang lebih umum. Teori fungsional stratifikasi (Davis dan Moore, 1945), menyandarkan pada premis-premis: (A) Bahwa beberapa posisi pekerjaan membutuhkan jenis-jenis khusus dari pekerja yang berkeahlian; (B) Bahwa posisi-posisi tersebut harus diisi dengan orang-orang yang selain memiliki bakat alamiah juga oleh anggota masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan, karena mereka dibutuhkan untuk melaksanakan peran-peran pekerjaan yang tersedia. Teori fungsi-teknis pendidikan dapat dilihat sebagai subtype dari bentuk analisis teori fungsional stratifikasi, karena teori fungsional, berdasarkan premisnya tersebut, memberi penekanan bahwa struktur pekerjaan menciptakan permintaan pada jenis-jenis pekerjaan khusus, dan pelatihan (pendidikan) adalah salah satu cara untuk mengisi permintaan itu. Sebagai tambahan penjelasan dari premis di atas, pendekatan fungsional memperhatikan bahwa persyaratan keterampilan pada suatu pekerjaan akan berubah seiring dengan industrialisasi dan pendekatan ini juga memperhatikan isi dari berbagai pengalaman sekolah.

Collins kemudian menguji proposisi dan premis tersebut dengan mencari bukti-bukti empirisnya. Pengujian pertama menemukan bukti, bahwa proses perubahan terhadap tuntutan pekerja yang berkeahlian atau berpendidikan terjadi dalam suatu masyarakat yang sekurang-kurangnya telah melewati titik awal industrialisasi. Pada saat itu pula terjadi peningkatan pendidikan di kalangan angkatan kerja yang dihubungkan dengan bergantinya struktur pekerjaan, di mana pekerjaan dengan keahlian rendah semakin menurun sedangkan pekerjaan dengan keahlian tinggi semakin meningkat.

Pengujian berikutnya didasarkan pada data yang dikumpulkan dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pada tahun 1950 dan 1960. Data tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya permintaan terhadap tenaga ahli hanya ada di beberapa pekerjaan khusus. Ditunjukkan pula bahwa tingkat pendidikan dari para angkatan kerja telah berubah melebihi apa yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan. Kondisi ini menyebabkan timbulnya pendidikan yang berlebih. Pada suatu lapangan pekerjaan banyak ditemukan pekerja yang pendidikannya melebihi apa yang dipersyaratkan, khususnya pada pria yang telah menamatkan pendidikannya sampai pada tingkat akademi, dan bagi wanita dengan pendidikan sederajat sekolah menengah atas serta ada beberapa yang berpendidikan akademi.

Pengujian lainnya terhadap teori fungsi-teknis, dilakukan Collins dengan mempertanyakan dua hal: (1) Apakah para pekerja yang memiliki pendidikan lebih tinggi atau lebih baik akan lebih produktif daripada pekerja yang kurang

berpendidikan; (2) Di manakah keahlian kejuruan dipelajari, apakah di sekolah atau di tempat lain.

Menurut Collins, bukti yang paling sering ditunjukkan terhadap pertanyaan pertama adalah bahwa pengaruh pendidikan pada produktivitas merupakan hubungan yang tidak langsung, di mana terdapat berbagai tingkat pengelompokan pendidikan dalam suatu masyarakat dan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Collins mengajukan tiga tipe penjelasan untuk memahami hal itu:

(i) Pendekatan Pertumbuhan Nasional: Pertumbuhan GNP di Amerika Serikat disebabkan oleh masukan konvensional berupa modal dan tenaga kerja; hal ini dihubungkan dengan perbaikan keterampilan dari para tenaga kerja yang didasarkan pada pendidikan yang semakin meningkat (Schultz, 1961; Denison, 1963). Menurut Collins, pendekatan ini kurang dapat menjawab permasalahan, karena tidak dapat membedakan secara jelas antara: perubahan teknologi yang ternyata mempengaruhi aturan produktif, yang mencakup juga perubahan kemampuan para pekerja melalui pengalamannya pada lapangan kerja dengan teknologi baru; dan perubahan keahlian yang disebabkan oleh pendidikan formal serta faktor-faktor motivasional yang berhubungan dengan masyarakat yang berorientasi pada kompetisi atau prestasi. Ahli lain yang berpendapat bahwa produktivitas berhubungan dengan pendidikan, adalah Denison (1965). Ia menghubungkan peningkatan pendapatan seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang diinterpretasikan sebagai imbalan dari sumbangan (pendidikan) mereka pada produktivitas. Menurut Collins, asumsi yang

demikian itu menjadi perdebatan ekonomi, karena upah mencerminkan nilai hasil, bukan digunakan untuk membuktikan sumbangan produktif pendidikan.

(ii) Hubungan antara pendidikan dan tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, semakin tinggi pula perbandingan penduduknya yang berpendidikan dasar, menengah dan tinggi (Harbison & Myers, 1964). Korelasi yang demikian itu, menurut Collins menimbulkan pertanyaan sebab-akibat. Terdapat variasi penjelasan yang sangat banyak pada fenomena penduduk yang mendaftar untuk bersekolah (penduduk usia sekolah di antara negara-negara dengan tingkat ekonomi yang sama, dan penjelasan dari beberapa variasi tersebut dihubungkan dengan konteks permintaan politis pada akses pendidikan (Ben-David, 1963-1964). Penjelasan lain untuk menyanggah hubungan antara pendidikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan menunjukkan bukti bahwa terdapat kelebihan produksi orang-orang terdidik di beberapa negara di mana tingkat pertumbuhannya tidak dapat menyerap kelebihan produksi tersebut. Situasi semacam ini memberi kesan, bahwa permintaan terhadap tenaga kerja berpendidikan tidak datang secara langsung dari lembaga ekonomi tetapi sebaliknya berlawanan dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi (Hoselitz, 1965).

(iii) Hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi seperti yang telah disebutkan di atas, menurut Collins sudah ketinggalan jaman. Bukti yang ada menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Sekolah Dasar ternyata mendahului peningkatan pertumbuhan ekonomi. Collins juga meragukan bahwa

pendidikan tinggi memiliki sumbangan penting pada pertumbuhan ekonomi. Sumbangan utama pendidikan pada produktivitas ekonomi, menurut Collins, terjadi pada masa transisi, yaitu pada masa pemberantasan buta huruf besar-besaran, pendidikan kemudian tidak berarti setelah melewati masa transisi tersebut. Bukti-bukti lain untuk menguji sumbangan pendidikan terhadap produktivitas individual, diambil Collins dari temuan Berg (1970). Berg menunjukkan bahwa pekerja yang berpendidikan lebih tinggi tidak secara umum lebih produktif, malahan untuk beberapa kasus justru kurang produktif. Temuan itu didasarkan atas sampel yang diambil dari pegawai yang bekerja di pabrik, bengkel-bengkel perawatan, teknisi, sekretaris, bank, bidang rekayasa, ilmuwan peneliti, personel militer dan pegawai sipil pemerintah.

Pengujian terhadap pertanyaan kedua, yakni mengenai: apakah keterampilan kejuruan dipelajari di sekolah atau di tempat lain, dijawab oleh Collins dengan menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan yang diajarkan secara khusus di sekolah untuk posisi pekerjaan kasar, sebenarnya tidak berhubungan dengan pekerjaan yang ada di masyarakat. Menurutnya, melatih kembali para pekerja dalam menghadapi perubahan teknologi di bidang industri, telah banyak dilakukan secara informal di dunia kerja. Hanya dalam jumlah kecil, beberapa lembaga pendidikan melakukan pelatihan kembali secara formal untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di dunia kerja kepada anak didiknya (Collins, 1969, Bright 1958). Memang terdapat hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan yang memiliki profesi tertentu, seperti dokter, insinyur, ilmuwan atau peneliti, guru serta



pengacara. Untuk profesi-profesi lainnya, tidak ada bukti tersedia yang dapat menunjukkan apakah keterampilan aktual yang dipelajari di sekolah lebih sesuai dengan dunia kerja, dibandingkan dengan keterampilan yang dipelajari secara langsung di lapangan. Dengan demikian pendidikan yang menekankan keahlian dapat dipertanyakan relevansinya dengan dunia kerja. Pendidikan akhirnya memberi kesan hanya sebagai penyangga “profesionalisasi” pekerjaan dan merupakan taktik umum untuk meningkatkan gengsi dari suatu pekerjaan (Wilensky, 1964).

Bukti-bukti yang dikumpulkan Collins seperti yang telah diuraikan di atas, pada akhirnya tidak mendukung proposisi teori fungsi-teknik pendidikan. Oleh karena itu Collins menganggap bahwa teori fungsi-teknik pendidikan kurang kuat untuk memahami hubungan antara pendidikan dan pekerjaan. Kegagalan teori ini menurut Collins, mungkin disebabkan oleh sumber teorinya, yaitu pendekatan fungsional. Asumsi dasarnya adalah bahwa terdapat seperangkat posisi pekerjaan yang telah ditetapkan, di mana dicukupi dengan membuat prasyarat dari bermacam-macam angkatan kerja. Permintaan yang sudah ditetapkan untuk bermacam-macam tipe keterampilan dengan waktu yang sudah tersedia itu, menjadi penentu dasar bagi siapa yang ingin dipilih dan untuk posisi apa. Perubahan sosial, menurut teori ini, kemudian dapat dijelaskan melalui perincian tentang bagaimana permintaan-permintaan fungsional tersebut berubah seiring dengan proses modernisasi. Masyarakat kemudian dilihat sebagai yang menentukan perilaku dan penghargaan pada individu-individu di dalamnya.

Kenyataan yang berkembang adalah bahwa “permintaan” untuk beberapa posisi pekerjaan tidak didasarkan pada kebutuhan yang sudah ditetapkan, melainkan atas dasar proses tawar-menawar antara orang-orang yang akan mengisi posisi pekerjaan dengan orang-orang yang akan mengendalikan pekerjaan tersebut. Individu pun akhirnya bekerja terutama adalah untuk memperoleh imbalan bagi diri mereka sendiri, baik berupa barang-barang material, kekuasaan dan juga gengsi.

Collins justru menemukan bukti bahwa faktor-faktor askriptif terus-menerus menjadi bagian penting untuk meraih sukses pekerjaan, bahkan dalam kehidupan masyarakat industri tingkat lanjut. Data tentang mobilitas sosial yang telah ada menunjukkan, bahwa asal sosial seseorang mempunyai pengaruh langsung pada sukses pekerjaannya. Menurut pandangan ini pendidikan bukan faktor utama yang dapat mengantarkan seseorang melakukan mobilitas sosial, pendidikan hanya menjadi faktor pendukung. Apabila dihadapkan dengan pendekatan fungsional tradisional, bentuk-bentuk askripsi tersebut diperlakukan sebagai kategori akibat: yaitu transisi dari masa yang belum maju atau tanda dari ketidaksempurnaan mekanisme fungsional dalam hal penempatan tenaga kerja.

Hipotesis lain yang dikemukakan oleh Collins menyebutkan bahwa kekuatan kelompok-kelompok yang didasarkan pada “askripsi” menjadi pertimbangan utama untuk menyeleksi anggota-anggotanya pada semua organisasi, dan keterampilan teknis dipertimbangkan menjadi nomor dua, tergantung dari keseimbangan kekuatan. Pendidikan kemudian dianggap sebagai cappa pada keanggotaan suatu kelompok, bukan sebagai tanda akan adanya keterampilan teknis

atau prestasi. Collins mengutip Weber (1968) yang menginterpretasikan kebutuhan-kebutuhan pendidikan di birokrasi, dengan mengambil contoh sejarah administrasi publik Prussia. Ditunjukkan oleh Weber bahwa lulusan dari beberapa universitas memonopoli berbagai posisi di birokrasi. Para alumni itu kemudian menciptakan status tertentu sehingga pada akhirnya dengan status itu mereka dapat meningkatkan keamanan dan kekuasaannya di lembaga tersebut.

2.2.3. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, karena tidak satupun di dunia ini yang tidak mempunyai kepentingan dalam pendidikan, termasuk Indonesia. Pada sidang tahunan MPR tahun 2000, telah disebutkan bahwa pendidikan nasional belum mempunyai arah yang jelas dan dana yang memadai. Untuk mengatasi hal itu maka dengan munculnya UU Nomor 22 1999 tentang otonomi daerah pemerintah mencoba mencari format baru sehingga arahnya semakin jelas dan dananya bisa memadai.

Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhana peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan pendidikan itu mulai ada sejak adanya makhluk manusia yakni Adam.

Pendidikan dirumuskan sebagai usaha yang sengaja diadakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangan mencapai kedewasaan (Idris, 1984: 10). Dalam GBHN disebutkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

Menurut instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974:

Pendidikan adalah segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmani dan ruhani, yang berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di luar sekolah dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sedangkan pengertian pendidikan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Pengertian pendidikan yang lebih luas dikemukakan oleh Prof. M.J. Longeveld (1992: 6) dengan memberikan pengertian bahwa:

Mendidik adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju ke arah kedewasaan dalam arti dapat berdiri dan bertanggung jawab susila atas segala tindakan-tindakannya menurut pilihannya sendiri.

Dengan memperhatikan pengertian pendidikan seperti yang diutarakan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa peran pendidikan adalah sebagai landasan untuk membentuk, mempersiapkan, membina dan mengembangkan

kemampuan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang.

Apabila dilihat dari pendekatan sistem, maka proses pendidikan terdiri dari masukan (sarana pendidikan) dan keluaran (perubahan perilaku), serta faktor yang mempengaruhi proses pendidikan yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perangkat lunak (*software*), yang mencakup antara lain kurikulum, organisasi pendidikan, peraturan, metode belajar, dan lainnya.
2. Perangkat keras (*hardware*), yaitu fasilitas yang mencakup gedung, perpustakaan, alat bantu peraga dan sebagainya.

Bank Dunia (1980: 32) mengungkapkan bahwa keluaran pendidikan adalah pencapaian prestasi belajar murid yang meliputi pengetahuan, keterampilan, tingkah laku dan sikap yang diukur dengan test, hasil ujian, dan sejenisnya. Beeby (1966: 23) menyatakan bahwa pendidikan mempunyai kualitas tinggi bilamana keluaran pendidikan itu mempunyai nilai bagi masyarakat yang memerlukan pendidikan itu. Kualitas di sini adalah keluaran pendidikan yang dikaitkan dengan kegunaan bagi masyarakat.

Tingkat Pendidikan adalah jenjang pendidikan yang telah diselesaikan. Beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan yaitu:

- a. Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan dan mempertinggi rasionalitas pemikiran. Kedua hal tersebut memungkinkan masyarakat mengambil keputusan.
- b. Pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan teknik yang diperlukan dalam kegiatan modern.
- c. Dapat menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi, dan aspek kehidupan masyarakat lainnya (Sastraadmadja, 1986: 157)

2.2.4. Manfaat Pendidikan

Majunya peradaban dan aspirasi manusia, semakin diperlukan orang yang mempunyai pengetahuan dalam jumlah dan mutu yang semakin tinggi. Pengetahuan diterima dan dihayati sebagai kekayaan yang sangat berharga dan produktif. Salah satu upaya untuk mencerdaskan dan meningkatkan keterampilan termasuk pencapaiannya adalah melalui pendidikan. E.F. Scumacher mengatakan bahwa *Pendidikan adalah yang terpenting, serta dilihat dari perannya, maka pendidikan adalah kunci untuk segalanya.*

Dalam GBHN tujuan pendidikan dinyatakan sebagai berikut:

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Sementara dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Bab II pasal 4 dikemukakan:

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

2.2.5. Jalur dan Jenis Pendidikan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal jalur dan jenis pendidikan dijelaskan sebagai berikut:

a. Jalur Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur yaitu pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Untuk jalur pendidikan sekolah dibagi menjadi beberapa jenjang mulai pendidikan pra sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah tinggi.

Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah menuju kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang membina keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan.

b. Jenis Pendidikan

Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah yaitu terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan profesional.

2.2.7. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.

Pendidikan menengah merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah mempunyai tujuan antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan anak untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan kemampuan anak sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya (Muslich, 1994: 11)

Berdasarkan tujuan di atas jelaslah bahwa manfaat pendidikan menengah adalah terbekalinya anak didik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan

sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan bekal hidup di tengah masyarakat. Ungkapan manfaat dari pendidikan menengah sebagaimana tersebut tidaklah berlebihan jika dikaitkan dengan amanat pendidikan menengah sebagai lanjutan pendidikan dasar di sekolah ditingkatkan agar mampu membentuk pribadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur serta untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang memerlukan tenaga berkemampuan dan berketerampilan.

Pendidikan menengah yang lamanya tiga tahun sesudah pendidikan dasar, diselenggarakan di SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja.

Siswa yang diterima di sekolah menengah harus telah tamat menempuh pendidikan dasar dan memiliki kemampuan yang diisyaratkan. Lulusan pendidikan menengah yang memenuhi persyaratan berhak melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

a. Pendidikan Menengah Umum

Pendidikan menengah umum adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa agar dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi.

Pendidikan umum untuk tingkat lanjutan atas diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Umum (http://www.pdk.go.id/publikasi/brief/94/94-95-sis_diknas.htm).

Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya. Yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMU, dan Universitas. Berbeda dengan tujuan sekolah menengah umum kejuruan yang mempersiapkan lulusannya agar siap untuk memasuki dunia kerja, sekolah menengah umum tidak disiapkan secara khusus agar nantinya para lulusan lembaga pendidikan itu siap memasuki dunia kerja melainkan diharapkan lulusannya mampu meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Oleh sebab itu maka materi pembelajaran pada lembaga pendidikan ini sama di seluruh wilayah Indonesia. Artinya bahwa lembaga pendidikan ini tidak secara khusus memberikan satu macam bidang keilmuan seperti pada pendidikan menengah kejuruan seperti halnya ilmu ekonomi pada SMEA, ilmu teknik pada STM dan sebagainya, melainkan lebih beragam. Ini disebabkan seperti yang tersebut di atas bahwa lembaga pendidikan ini tidak mencetak tenaga-tenaga terampil yang siap memasuki dunia kerja, melainkan lebih diutamakan pada penguasaan materi guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Pendidikan Menengah Kejuruan

Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu sehingga siap memasuki lapangan kerja. Pendidikan kejuruan

hanya diselenggarakan di tingkat lanjutan atas. Pendidikan kejuruan mengutamakan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain. Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, SMK, SMEA (http://www.pdk.go.id/publikasi/brief/94/94-95-sis_diknas.htm).

Dalam rangka mempersiapkan siswa sekolah menengah kejuruan untuk menjadi tenaga kerja, di sekolah menengah kejuruan dapat didirikan unit produksi yang beroperasi secara profesional. Sesuai dengan tujuan didirikannya sekolah menengah kejuruan, maka masing-masing lembaga pendidikan kejuruan ini memberikan pembelajaran kepada anak didiknya sesuai dengan fokus bidang pendidikan lembaga tersebut, misalnya SMEA yang memfokuskan pada jurusan akuntansi, sekretaris, dan sebagainya. Masing-masing lembaga pendidikan itu memberikan materi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional.

Kurikulum yang diberikan kepada siswa terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Pemberian muatan lokal didasarkan atas kenyataan bahwa setiap daerah di wilayah tanah air Indonesia memiliki ciri khas mengenai adat istiadat, tata cara dan tata krama pergaulan, kesenian, bahasa, lisan maupun tulisan, kerajinan, dan nilai-nilai kehidupannya masing-masing. Bahkan karena keanekaragamannya itu bukan saja mengenai kebudayaannya, melainkan juga kondisi alam dan lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial budaya yang terdapat dalam pola

kehidupan daerah karena keanekaragamannya disederhanakan dan diklasifikasikan menjadi delapan kelompok yakni:

1. Perikanan darat dan laut
2. Peternakan
3. Persawahan
4. Perladangan dan perkebunan
5. Perdagangan, termasuk di dalamnya jasa
6. Industri kecil, termasuk di dalamnya industri rumah tangga
7. Industri besar
8. Pariwisata.

Berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah akan tuntutan pasar kerja, maka sekolah menengah kejuruan dibuka di wilayah tersebut disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial budaya daerah tersebut. Dalam penerapannya, maka pada masing-masing lembaga pendidikan kejuruan itu memberikan kurikulum sesuai dengan klasifikasi lembaga pendidikan kejuruan tersebut. Dengan pemberian materi kepada peserta didik sesuai dengan klasifikasi lembaga pendidikan itu diharapkan nantinya agar lulusan dari lembaga pendidikan kejuruan itu siap untuk memasuki lapangan kerja yang siap pakai.

2.3. Konsep Keluarga Sejahtera

Badan Koordinasi Keluarga Sejahtera berencana Nasional (BKKBN) telah menentukan beberapa aspek untuk mengukur tingkat kesejahteraan dari suatu

keluarga yaitu: sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, agama, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga interaksi dengan lingkungan, informasi, dan transportasi. Semakin banyak aspek yang dipenuhi oleh suatu keluarga maka tingkat kesejahteraan suatu keluarga tersebut semakin tinggi. Sebaliknya semakin sedikit aspek yang dapat dipenuhi maka tingkat kesejahteraannya semakin rendah (Gayatri, 1995: 4).

Untuk mengetahui kesejahteraan suatu keluarga, harus diketahui sejauhmana tingkat kebutuhan dasar dapat dipenuhi oleh keluarga itu. Hal ini menjadi persoalan sebab antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya, tingkat pemenuhan kebutuhannya relatif berbeda, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan ruhani.

Menurut Hoffer (1960), ada beberapa hal yang dapat menjadi penghambat terwujudnya tingkat kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ada lima jenis hambatan yang merupakan dasar dari masalah kesejahteraan, yaitu meliputi:

1. Ketergantungan ekonomi,
2. Ketidakmampuan menyesuaikan diri,
3. Kesehatan yang buruk,
4. kurang atau tidak adanya pengisian waktu senggang dan sarana rekreasi, serta
5. Kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang baik atau tidak baik.

Masalah ketergantungan ekonomi dapat dilihat pada kesulitan yang dialami individu, keluarga atau masyarakat yang disebabkan oleh berbagai hal. Di dalam konteks keluarga, masalah ekonomi dapat disebabkan oleh kurangnya atau rendahnya tingkat pendapatan keluarga, sehingga keluarga tidak mampu memenuhi

kebutuhannya tersebut meskipun pada tahap minimal. Sebab lain yang juga dapat mempengaruhi masalah ketergantungan ekonomi adalah ketidakmampuan atau ketidaktahuan kepala keluarga dalam mengelola pendapatan yang diperolehnya. Apabila keadaan seperti ini, maka aspek kesehatan akan mengikuti pula. Misalnya, aspek kesehatan yang semakin menurun pada keluarga-keluarga dengan status sosial ekonomi rendah. Artinya, penyakit yang diderita manusia sesungguhnya tidak disebabkan oleh aspek organik saja, melainkan merupakan rangkaian dari kondisi sosial ekonomi yang kurang atau tidak baik (Philips: 1974).

Sementara itu Miles dan Irvings (1985), lebih memandang bahwa persoalan kesejahteraan keluarga bergayut erat dengan konsep martabat manusia. Di dalam konteks ini, pengukuran kesejahteraan keluarga dapat diidentifikasi melalui empat dimensi, yaitu: *pertama*, rasa aman (*security*); *kedua*, kesejahteraan (*welfare*); *ketiga*, kebebasan (*freedom*); dan *keempat*, jati diri (*identity*).

Dimensi rasa aman dapat diukur melalui indikator seperti: derajat kerentanan terhadap kematian (kesakitan) karena kecelakaan atau kekerasan dan kerentanan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan atau pengangguran. Sementara itu yang dimaksud dengan kesejahteraan dalam arti sempit adalah *socioeconomic wellbeing*. Kesejahteraan keluarga dalam dimensi kesejahteraan, dapat diukur melalui indikator kesehatan fisik dan pemilikan barang. Di dalam dimensi kebebasan (*freedom*), tingkat kesejahteraan keluarga dapat diukur dengan sejauh mana keluarga memiliki akses terhadap berbagai sumber daya, misalnya kepemilikan kapital, mobilitas pekerjaan dan lapisan sosialserta pemilikan waktu luang. Kemudian pada

dimensi jati diri, kesejahteraan keluarga dapat diukur melalui indikator insiden bunuh diri, ketergantungan atau kecanduan pada obat-obat penenang, insiden gangguan jiwa dan tindak kekerasan terhadap anak atau anggota keluarga lain.

Di dalam paradigma Indikator Sosial yang merupakan bagian dari paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*) dijelaskan, bahwa selain indikator ekonomi (*economic accounting*), indikator sosial (*social accounting*) juga penting untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat akibat pembangunan. Indikator sosial ini akan memberi kemungkinan untuk memantau apa yang telah dicapai dalam pembangunan nasional suatu negara bagi rakyatnya, melalui pemantauan kecenderungan kesejahteraan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Objek yang dipantau oleh paradigma Indikator Sosial adalah kesejahteraan, meskipun terminologi yang digunakan bervariasi, seperti: *welfare* atau *well-being*. Akan tetapi, apa yang tercakup dalam konsep *welfare* atau *well-being* tadi, sangat bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lain. *Overseas Development Council* misalnya, memperkenalkan ukuran kesejahteraan yang disebut PQLI (*Physical Quality of Life Index*), yang mencakup:

1. Angka kematian bayi (*infant mortality rate*),
2. Harapan hidup pada bayi berumur satu tahun (*life expectancy at age one*), dan
3. Tingkat kemampuan membaca dan menulis (*basic literacy*) (Morris: 1979)

Paradigma Indikator Sosial tersebut menampakkan pengaruhnya di Indonesia. Hal ini tercermin dari dirumuskannya Indikator Sosial di Indonesia pada tahun 1974 yang mencakup 10 komponen dan 115 indikator (Hendra, 1986: 382-

385). Komponen tersebut mencakup: (1) Kependudukan, termasuk Keluarga Berencana dan Transmigrasi, (2) Kesehatan, (3) Gizi, (4) Tenaga Kerja dan Koperasi, (5) Pendidikan dan Kebudayaan, (6) Kesejahteraan Sosial, (7) Perumahan, (8) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, (9) Agama dan (10) Umum.

Di dalam perkembangannya, pada tahun 1980 Indikator Sosial Indonesia kemudian dirubah menjadi Indikator Kesejahteraan Rakyat yang mencakup 6 komponen dan 93 indikator. Komponen-komponen tersebut adalah: (1) Penduduk, (2) Pendidikan dan Sosial-Budaya, (3) Kesehatan, Gizi dan Pengeluaran/Konsumsi Rumah Tangga, (4) Angkatan Kerja, (5) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, (6) Perumahan dan Lingkungan Hidup (Tjokrowinoto, 1995).

Konsep “Sejahtera” dirumuskan lebih luas daripada sekedar definisi kemakmuran ataupun kebahagiaan. Tentu saja konsep “Sejahtera” tidak hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan fisik orang atau pun keluarga sebagai entitas, tetapi juga kebutuhan psikologisnya. Tiga kelompok kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengembangan. Pembangunan program keluarga sejahtera mencakup 13 variabel seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, agama, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan, transportasi, tabungan, informasi, dan peranan dalam masyarakat.

2.3.1. Pengertian Keluarga Sejahtera

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1992, bahwa keluarga sejahtera yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota masyarakat dan lingkungan (BKKBN, 1996). Bahwa di dalam menuju keluarga telah melalui perkawinan yang sah, dan keluarga di dalam fungsinya adalah sebagai pendidik dan sosialisasi diharapkan mampu sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka dan mampu menumbuhkan serta mengembangkan kekuatan fisik, sosial dan spiritual secara serasi, selaras, dan seimbang.

Pendidikan terbaik bagi anak adalah dengan memberikan contoh atau tauladan, sebelum mendidik anak menjadi sosok yang berkualitas diharapkan orang tua juga harus memiliki atau meningkatkan kualitas dirinya, terlebih kualitas seorang ibu yang bertugas mengasuh anak mulai lahir sampai dewasa. Dengan peningkatan pendidikan orang tua akan menanamkan dampak yang berarti bagi anaknya, karena dengan asuhan yang salah maka pertumbuhan anak tersebut juga akan salah.

Menurut Sutjipto (1982), kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan-hambatan yang serius di dalam lingkungan keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalahkeluarga akan mudah untuk diatasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud. Lebih jauh Suprihadi (dalam Sutjipto, 1982) menjelaskan yang dimaksud

kesejahteraan keluarga adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan di dalam keluarga yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, serta ketentraman lahir dan batin bagi anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, serta sosial pada anggota keluarga yang pada akhirnya dapat mewujudkan keserasian dan keharmonisan dalam keluarga maupun masyarakat.

Konsepsi tersebut di atas mengandung arti bahwa kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi yang harus diciptakan oleh keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Adapun keluarga sejahtera merupakan model yang dihasilkan dari usaha kesejahteraan keluarga. Mengingat kesejahteraan keluarga bersifat kondisional, tentu perlu adanya ukuran-ukuran dari keadaan tersebut. Dengan kata lain, ada indikator-indikator minimal yang harus dicapai oleh setiap keluarga. Dengan demikian, sebuah keluarga yang dapat memenuhi indikator-indikator yang ada, maka keluarga tersebut dapat dikatakan keluarga yang sejahtera.

Menurut Masyfuk Zuhdi, kesejahteraan keluarga adalah telah diterimanya secara seimbang atau *balance* antara kebutuhan spiritual dan material, keruhanian atau keagamaan, kebutuhan biologis, dan kebutuhan sosial dari suatu keluarga. Pendapat lain tentang keluarga sejahtera bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keaserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu keluarga yang tata kehidupannya diliputi rasa saling pengertian, tenggang rasa, kegotongroyongan dalam suasana kekeluargaan yang harmonis, mesra, keamanan dan ketertiban terjamin, menjunjung tinggi hak asasi dan ketentuan hukum

serta melaksanakan kewajiban sebagai warga dan insan sosial seperti yang diamanatkan oleh Pancasila (Tim Penggerak PKK Tingkat I Jawa Tengah).

Pada dasarnya pencapaian keluarga sejahtera tidak terlepas dari bagaimana kita berusaha mewujudkan suatu keluarga yang berhasil dengan bangga mampu memenuhi segala kebutuhan dasar keluarga, kebutuhan sosial psikologisnya dan kebutuhan pengembangannya. Dengan adanya masalah keluarga sejahtera maka tidak terlepas juga mengenai masalah hak dan tanggung jawab dari setiap anggota keluarga, baik bapak, ibu maupun anaknya. Ada beberapa segi yang harus dipelajari dan dilaksanakan dalam usaha mempersiapkan cara berkeluarga agar terwujud keluarga yang sejahtera. Segi-segi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan Kesehatan

Di dalam mempersiapkan perkawinan calon suami atau istri harus memperhatikan masalah kesehatan mereka. Suami istri yang sehat akan menjamin ketentraman keluarga. Untuk itu sebelum menikah sebaiknya memeriksakan diri ke dokter atau puskesmas terdekat.

b. Usia untuk Kawin

Usia perempuan untuk melangsungkan perkawinan adalah 18 – 20 tahun, karena pada usia tersebut telah dewasa dilihat dari bentuk badan. Tetapi dilihat dari kesehatan jiwanya umur perempuan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga adalah 25 tahun karena pada umur tersebut sudah cukup matang di dalam berfikir maupun di dalam mengambil keputusan. Demikian juga halnya dengan laki-laki,

pada umur 25 – 27 tahun ia telah siap dan mampu secara dewasa untuk menjadi suami sebagai pembimbing keluarga.

c. **Ekonomi Keluarga**

Untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga mereka harus memiliki pendapatan yang cukup, apalagi jika menginginkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga yang ekonominya lemah akan menjadi beban bagi kelangsungan hidup keluarga itu sendiri. Untuk itu bagi seseorang yang ingin berkeluarga harus sudah mempunyai penghasilan yang tetap. Hal ini diutamakan bagi laki-laki sebagai kepala rumah tangga seperti biaya pendidikan anak, kesehatan, makanan, pakaian, perumahan dan sebagainya (BKKBN, 1992: 12)

2.3.2. Indikator Keluarga Sejahtera

Dalam membahas masalah keluarga sejahtera, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi masyarakat dan membutuhkan pemahaman yang luas terhadap konsep keluarga sejahtera serta memperhatikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarganya. Untuk itu maka masyarakat tidak hanya perlu motivasi tetapi juga memerlukan informasi yang lebih lengkap tentang berbagai aspek dari keluarga sejahtera itu sendiri. Informasi tentang keluarga sejahtera sebenarnya telah banyak di masyarakat namun karena keberadaan informasi tersebut tidak terjangkau oleh masyarakat karena beberapa hal seperti letak dan sebaran sumber-sumber pemberi informasi tentang keluarga sejahtera yang jauh dari jangkauan tempat tinggal mereka. Untuk itu guna membantu mengatasi masalah

tersebut sebenarnya memerlukan fasilitas atau dengan cara tersendiri yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri, sebagai contoh:

1. Pemberian informasi pada saat mengadakan arisan atau pertemuan PKK oleh kader petugas lapangan keluarga berencana (PLKB).
2. Pemberian informasi atau keterangan di sela-sela waktu pengajian,
3. Pemberian informasi lebih lanjut pada saat kegiatan posyandu pada ibu-ibu oleh petugas lapangan.

Dengan pemberian layanan informasi tentang keluarga sejahtera tersebut dimaksudkan sebagai pelengkap dan merupakan media agar berbagai informasi tentang keluarga atau informasi yang lainnya yang masih tersebar dapat mengumpul menjadi satu pada lokasi yang terjangkau oleh masyarakat sekitar.

Indikator keluarga sejahtera pada dasarnya disusun untuk menilai taraf pemenuhan kebutuhan keluarga yang dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar sampai dengan pemenuhan kebutuhan untuk pengembangan diri dari keluarga (Soemardjan, 1994). Ukuran taraf pemenuhan kebutuhan tersebut dibagi dalam tiga kelompok dan masing-masing kelompok dibagi dalam variabel yang masing-masing ditetapkan rincian variabel sebagai kumpulan dari indikator keluarga sejahtera sebagai berikut:

1. Kebutuhan Dasar atau *basic needs*, yang terdiri dari variabel:
 - a. pangan
 - b. sandang
 - c. papan

- d. kesehatan
2. Kebutuhan Sosial Psikologis atau *social-psychological needs* yang terdiri dari:
 - a. pendidikan
 - b. rekreasi
 - c. transportasi
 - d. interaksi sosial internal dan eksternal
 3. Kebutuhan pengembangan atau *development needs* yang terdiri dari:
 - a. Tabungan
 - b. Pendidikan khusus/kejuruan
 - c. Akses terhadap informasi

Variabel-variabel ini adalah sekaligus merupakan konsep-konsep kunci yang kemudian dijabarkan secara lebih terperinci ke dalam satuan ukuran yang lebih riil atau nyata sebagai perwujudan dari indikator-indikator yang *sensitive, simple, observable, measurable* dan *workable* di lapangan.

Sementara menurut Badan Pusat Statistik Indikator Kesejahteraan Rakyat meliputi 7 unsur utama; (1) Kependudukan, (2) Kesehatan dan Gizi, (3) Pendidikan, (4) Ketenagakerjaan, (5) Taraf dan pola konsumsi, (6) Perumahan dan lingkungan, dan (7) Sosial budaya.

2.3.3. Aplikasi Indikator Keluarga Sejahtera

Pendataan keluarga dengan menggunakan indikator keluarga sejahtera dilaksanakan oleh para kader dengan bimbingan Petugas atau Penyuluh Lapangan

Keluarga Berencana (PLKB). Hasil pendataan dalam bentuk Rekapitulasi Nasional diterbitkan oleh Biro Pelaporan dan Statistik BKKBN. Melalui pendataan keluarga dapat diperoleh gambaran status kesejahteraan keluarga di Indonesia.

Atas dasar pemenuhan kebutuhan keluarga yang diukur melalui indikator yang digunakan dan dikaitkan dengan tingkat pemenuhannya, maka telah ditetapkan lima tahapan keluarga sejahtera serta ciri-ciri yang membedakan masing-masing kelompok yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), Keluarga Sejahtera III Plus (KS III+).

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Hal tersebut tampak dari ketidakmampuan mereka dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Jika suatu keluarga tidak mampu memenuhi kriteria tahap Keluarga Sejahtera I, keluarga itu berada pada kondisi **Pra Sejahtera**. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Keluarga sejahtera II adalah keluarga yang di samping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Keluarga Sejahtera III adalah

berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Keluarga Sejahtera Tahap III Plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial-psikologis, dan pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Itulah beberapa kriteria secara umum yang ditentukan oleh BKKBN pusat yang dicanangkan dalam program keluarga sejahtera. Hal-hal tersebut di atas merupakan kriteria yang bersifat material, spiritual, dan sosial kemasyarakatan.

Dari tahapan di atas, Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I digolongkan ke dalam keluarga miskin. Kemiskinan di sini bukan semata karena faktor ekonomi, namun juga faktor non ekonomi, seperti masih ada anggota keluarga yang buta huruf, tidak atau belum menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, dan lain sebagainya. Dengan demikian, keluarga miskin menurut pengertian keluarga sejahtera berarti miskin karena faktor ekonomi dan miskin karena faktor non-ekonomi. Pengertian semacam ini mirip seperti yang dikembangkan oleh UNDP melalui *Human Poverty Index* (HPI) (Tjiptoherijanto, 1997).



BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

BAB 3

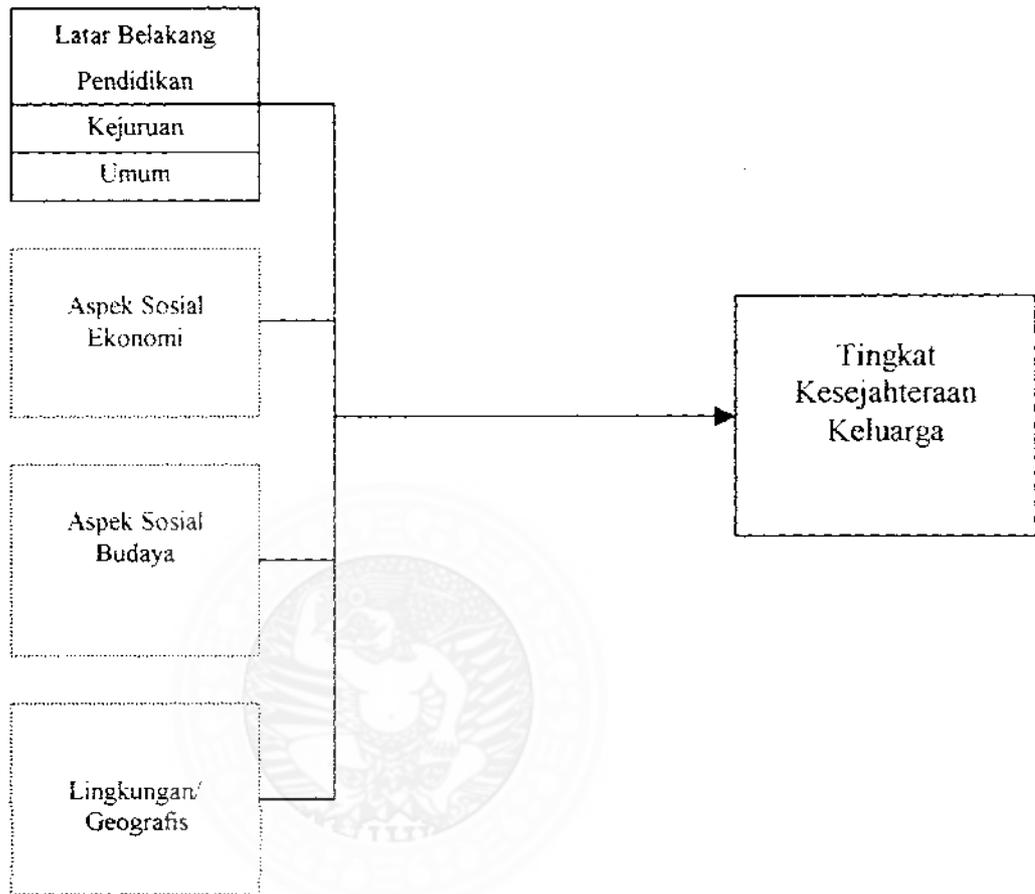
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1. Kerangka Konseptual

Kesejahteraan keluarga adalah fenomena yang bersifat kasat mata (*intangible*), dan oleh karenanya kesulitan utama untuk merumuskan indikator serta konsep kesejahteraan keluarga sesungguhnya bersumber pada kenyataan, bahwa kesejahteraan keluarga pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang *multi-facet* serta *multi dimensional*. Menurut Hoffer (1960), ada beberapa hal yang dapat menjadi penghambat tingkat kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ada lima jenis hambatan yang merupakan dasar dari masalah kesejahteraan meliputi ketergantungan ekonomi, ketidakmampuan menyesuaikan diri, kesehatan yang buruk, kurang atau tidak adanya pengisian waktu senggang dan sarana ekonomi, dan kondisi sosial, penyediaan dan pengolahan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik.

Miles dan Irvings (1985) memandang persoalan kesejahteraan keluarga erat kaitannya dengan konsep martabat manusia yang pengukurannya diidentifikasi melalui empat dimensi yaitu rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jatidiri (*identity*). Dalam paradigma Indikator Sosial yang merupakan bagian dari paradigma Kesejahteraan (*Welfare Paradigm*), selain indikator ekonomi (*economic accounting*), indikator sosial (*social accounting*) juga penting untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat akibat pembangunan.

Dari gambaran beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga di atas secara ringkas dapat dibuat diagram sebagai berikut:



Keterangan: - - - - - : tidak diteliti

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga adalah tingkat pendidikan. Dalam banyak hal, perbedaan tingkat pendidikan dapat menentukan tingkat kesejahteraan suatu keluarga. Demikian pula perbedaan bidang pendidikan yang ditekuni seseorang sedikit banyak akan berpengaruh pula pada tingkat kesejahteraannya.

3.2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara pendidikan menengah umum dan kejuruan dengan tingkat kesejahteraan keluarga petani, pedagang dan nelayan.
2. Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan keluarga petani, pedagang dan nelayan antara kepala keluarga yang berpendidikan menengah umum dan kejuruan
3. Tingkat kesejahteraan keluarga dengan kepala keluarga berpendidikan menengah kejuruan lebih sejahtera daripada yang berpendidikan menengah umum.





BAB IV

METODE PENELITIAN

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian penjelasan (*explanatif research*) karena menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis tanpa memberikan perlakuan (Singarimbun, 1989: 5). Penelitian penjelasan menurut Faisal (2001) untuk menguji hubungan pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan. Data diperoleh langsung dari responden untuk selanjutnya diolah secara ilmiah.

4.2. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tujuan penelitian maka dipilihlah lokasi penelitian yaitu Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Alasan memilih lokasi ini karena daerah ini cukup representatif yakni terdapat kegiatan pertanian, perdagangan serta daerah nelayan.

4.3. Penentuan Populasi dan Sampel

4.3.1. Populasi

Obyek sasaran penelitian atau populasi penelitian ini adalah keluarga petani, pedagang dan nelayan dengan kepala keluarga yang berpendidikan menengah

umum dan kejuruan yang berada di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

4.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi, sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi. Sampel harus mempunyai paling sedikit satu sifat yang sama dari populasi (Hadi, 2002: 220).

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *simple random sampling*, dengan mempertimbangkan ciri-ciri populasi yang telah diketahui sebelumnya, yaitu subjek yang bermata pencaharian petani, pedagang serta nelayan dengan latar belakang pendidikan sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan. *Random Sampling* adalah suatu cara pengambilan sampel dengan tidak memilih-milih individu-individu yang ditugaskan untuk mengisi sampel (Hadi, 2002: 223) atau dengan kata lain bahwa masing-masing individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Jumlah subjek yang digunakan sebanyak 90 keluarga berdasarkan kriteria yang ditentukan.

4.4. Identitas Variabel

X : Pendidikan Menengah (*Dependent Variable*) , meliputi:

- Tamat Pendidikan Menengah Umum
- Tamat Pendidikan Menengah Kejuruan

Y : Tingkat Kesejahteraan Keluarga (*Independent Variable*) dengan indikator sebagai berikut:

- Keluarga Pra Sejahtera

Yaitu Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*Basic Needs*) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, dan kesehatan sebagaimana kriteria pada tahap Keluarga Sejahtera I.

- Keluarga sejahtera I

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi sebagaimana kriteria pada tahap Keluarga Sejahtera II. Kebutuhan dasar tersebut adalah:

1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan untuk bepergian.
4. Bagian yang terluas dari lantai bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit dan atau pasangan usia subur (PUS) ingin ber-KB di bawa ke sarana atau petugas kesehatan serta diberi obat atau cara ber-KB modern.

- Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Kebutuhan fisik dan sosial psikologis tersebut adalah:

6. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
7. Paling kurang sekali seminggu, keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk-pauk.
8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
9. Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni rumah.
10. Seluruh anggota keluarga setiap tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing.
11. Paling kurang satu orang anggota keluarga usia 15 tahun ke atas berpenghasilan tetap.
12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin.
13. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
14. Bila telah mempunyai 2 orang anak, keluarga yang masih PUS (pasangan usia subur) menggunakan alat kontrasepsi, kecuali sedang hamil.

- Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberi sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Pada keluarga ini kebutuhan yang terpenuhi tersebut adalah:

15. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
16. Sebagian dari penghasilan keluarga disisihkan untuk tabungan keluarga.
17. Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sehari dalam sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
18. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
19. Keluarga mengadakan rekreasi bersama atau penyegaran di luar rumah paling kurang sekali dalam 6 bulan.
20. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar atau radio, televisi ataupun majalah.
21. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

- Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologisnya dan pengembangannya serta dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Pada Keluarga Sejahtera III Plus ini segala kebutuhan telah terpenuhi serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi yaitu:

22. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk material.
23. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.

4.5. Definisi Operasional

Secara Operasional konsep-konsep tersebut di atas dapat didefinisikan sebagai berikut:

Variabel	Parameter	Alat Ukur	Skala Data
Tingkat Kesejahteraan	Masing-masing tingkatan memenuhi poin indikator keluarga sejahtera: - Pra Sejahtera : < 5 - Sejahtera I : 1-5 - Sejahtera II : 1-14 - Sejahtera III : 1-21 - Sejahtera III Plus : 1-23	Quesioner	Ordinal 1. Pra Sejahtera 2. Sejahtera I 3. Sejahtera II 4. Sejahtera III 5. Sejahtera III Plus
Pendidikan	Umum: SMU Kejuruan: SMK	Quesioner	Nominal 1: Umum 2: Kejuruan

4.6. Instrumen Penelitian

4.6.1. Penentuan Skor

Indikator-indikator variabel dalam penelitian ini dijabarkan dalam item-item pertanyaan, di mana setiap pertanyaan diberi range skor 0-1. Pemberian skor 0 s/d 4

lebih lazim digunakan dilihat dari sudut pandang pengukuran dibandingkan 1 s/d 5 (Anwar, 200:53). Dalam penelitian ini, untuk masing-masing jawaban memiliki bobot sebagai berikut: 1 bila responden menjawab ya dan 0 bila menjawab tidak terhadap setiap pertanyaan yang diajukan.

4.6.2. Validitas Instrumen Penelitian

Validitas instrumen (alat ukur) adalah ukuran sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat tes dalam melakukan fungsi ukurannya (Azwar, 1995: 55) atau sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang ingin diukur (Singarimbun, 1989:124). Teknik yang digunakan dalam mencari validitas butir item adalah teknik Korelasi Product Moment dari Karl Pearson (Validitas internal), yang mendasarkan pada perhitungan dengan angka kasar seperti apa adanya (Hadi, 1991: 23).

Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi 5% (0,05) atau batas toleransi menerima kesalahan dari hasil hipotesa terhadap nilai parameter populasi artinya apabila hipotesis penelitian benar maka tingkat signifikansi sebesar 5% tersebut menunjukkan prosentase peluang rata-rata sampel atau nilai statistik yang terletak di luar batas kepercayaan. Hal ini supaya diketahui nilai korelasi yang diperoleh sudah signifikan atau tidak. Penentuan valid atau tidaknya pernyataan atau item ditentukan melalui besarnya koefisien dan arah korelasi. Bila antara skor pernyataan dengan skor totalnya arah korelasinya negatif, maka tanpa melihat besarnya koefisien item tersebut dinyatakan tidak valid.

Bila antara skor pernyataan dengan skor totalnya arah korelasi positif, maka penentuan valid atau tidaknya item dilihat dari besarnya koefisien korelasi. Jika koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar daripada nilai tabel korelasi, maka item tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya jika besarnya korelasi yang diperoleh lebih kecil dari tabel korelasi, maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

4.6.3. Reliabilitas Instrumen Penelitian

Reliabilitas merupakan petunjuk sejauhmana suatu alat ukur (instrumen) dapat memberikan hasil yang korelatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran ulang (Azwar, 1995). Dari item-item yang valid dilakukan uji keandalan (reliabilitas) butir, yang bertujuan untuk menguji stabilitas interval butir pernyataan dalam mengungkap indikator.

Perhitungan keadaan butir dalam penelitian ini menggunakan teknik Alpha Cronbach. Alat pengumpul data handal apabila memiliki koefisien realibilitas besar atau sama dengan 0,5. Alasan digunakan teknik ini karena teknik ini cocok untuk menguji reliabilitas instrumen yang masing-masing butirnya mempunyai lebih dari satu alternatif jawaban, di mana tidak ada jawaban yang benar atau salah.

4.7. Prosedur Pengumpulan Data

4.7.1. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data skunder. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengadakan pengamatan serta wawancara secara langsung dengan keluarga petani,

pedagang dan nelayan. Data yang diperoleh merupakan data mentah yang selanjutnya akan diolah untuk disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta sumber lainnya yang berupa informasi mengenai keadaan tingkat kesejahteraan keluarga secara umum baik yang diperoleh dari instansi atau dinas terkait.

4.7.2 Cara Pengumpulan Data

Untuk menguji kebenaran rumusan masalah dan pemecahannya serta hipotesis yang telah dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi dengan jalan mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti yang meliputi kondisi keluarga petani, sarana yang digunakan dalam bekerja dan data yang menunjang pengamatan.

2. Teknik Interview terstruktur dengan kuesioner

Teknik interview dilakukan dengan jalan wawancara langsung menggunakan kuesioner dengan keluarga petani.

4.8. Cara Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), sebelum dilakukan pengolahan data, perlu pemeriksaan data terlebih dahulu, dengan kata lain data atau informasi/keterangan yang telah dikumpulkan dari kuesioner yang dibagikan perlu dibaca atau diperiksa sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan, seperti lengkapnya pengisian jawaban.
- b. Pembuatan kode (*coding*), melakukan *coding* terhadap data yang sudah diedit sebagai usaha untuk menyederhanakan data, yaitu dengan memberi simbol angka pada masing-masing kategori jawaban dari seluruh responden.
- c. Membuat tabulasi data, yaitu dilakukan dengan memasukkan data ke dalam tabel-tabel dan mengatur angka-angka sehingga dapat menghitung jumlah jawaban dalam berbagai kategori.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes chi kuadrat. Uji ini digunakan karena pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan skala pengukuran terendah adalah nominal. Akan tetapi jika terdapat lebih dari 20% sel yang nilai *expected count*-nya kurang dari 5 maka digunakan Fisher's Exact Test.

Untuk melihat perbedaan antara kelompok umum dan kelompok kejuruan pada penelitian ini digunakan uji Mann-Whitney.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kecamatan Pademawu yang berada di wilayah kabupaten Pamekasan ini merupakan daerah dataran rendah yakni memiliki ketinggian sekitar 7 meter di atas permukaan laut. Luas Kecamatan Pademawu ini 7.219 ha yang terbagi atas 22 desa dan kelurahan yang dibatasi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Galis dan Kecamatan Larangan
- Sebelah Timur : Kecamatan Galis dan Selat Madura
- Sebelah Barat : Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Kota Pamekasan
- Sebelah Selatan : Selat Madura

Jumlah penduduk Kecamatan Pademawu ini adalah 66.003 jiwa yang terdiri atas 32.015 laki-laki dan 33.988 wanita.

Distribusi penduduk Kecamatan Pademawu menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Jumlah penduduk menurut agama yang dianut

Agama	Jumlah	Prosentase
Islam	65.843	99.7%
Kristen	109	0.2%
Katholik	51	0.1%
J u m l a h	66.003	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Pademawu

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Pademawu beragama Islam yakni sebesar 99,7%.

Untuk memenuhi kebutuhan ibadah penduduk Kecamatan Pademawu tersedia beberapa sarana peribadatan. Masing-masing agama tersedia fasilitas peribadatan seperti masjid dan gereja. Beberapa sarana peribadatan di antaranya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Distribusi sarana ibadah yang tersedia di Kec. Pademawu

Sarana Ibadah	Jumlah	Prosentase
Masjid	78	24.5%
Langgar	212	66.7%
Mushalla	27	8.5%
Gereja	1	0.3%
Jumlah	318	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Pademawu

Sedangkan distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3 Distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
TK	1.688	4.2%
SD	19.085	47.6%
SLTP	9.966	24.9%
SLTA	8.074	20.1%
D1-D2	469	1.2%
S1	816	2.0%
Jumlah	40.098	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Pademawu

Dengan melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Pademawu terbanyak yakni pada tingkatan Sekolah Dasar yakni sebesar 47,6% disusul kemudian SLTP dan SLTA masing-masing sebesar

24,9% dan 20,1%. Sedangkan pada tingkat pendidikan tinggi sebanyak 3,2% baik pada tingkatan D1 sampai S1.

Sarana pendidikan yang tersedia untuk menampung penduduk usia sekolah yakni dengan tersedianya fasilitas pendidikan dalam beberapa tingkatan seperti tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Distribusi sarana pendidikan yang tersedia di Kec. Pademawu

Sarana Pendidikan	Jumlah	Prosentase
TK	27	29.3%
SD	57	62.0%
SLTP	6	6.5%
SLTA	2	2.2%
Jumlah	92	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Pademawu

Untuk melayani kebutuhan masyarakat akan kesehatan, di Kecamatan pademawu ini tersedia beberapa fasilitas kesehatan di antaranya sebagai berikut:

Tabel 5.5 Distribusi fasilitas kesehatan yang tersedia di Kec. Pademawu

Sarana Kesehatan	Jumlah	Prosentase
Puskesmas	2	2%
Puskesmas Pembantu	4	4%
Posyandu	82	82%
Polindes	12	12%
Jumlah	100	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Pademawu

Berdasarkan mata pencaharian, penduduk kecamatan Pademawu terbanyak adalah sebagai petani (53,4%). Sedang buruh tani sebanyak 10,1% dari total penduduk kecamatan ini. Adapun penduduk yang berprofesi sebagai pedagang dan nelayan masing-masing sebesar 7,4% dan 8,7%. Profesi penduduk terbesar kedua

adalah sebagai pegawai. Data selengkapnya mengenai distribusi pekerjaan penduduk sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5.6 Distribusi penduduk menurut mata pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
Petani	13.807	53.4%
Pedagang	1.901	7.4%
Nelayan	2.238	8.7%
Buruh Tani	2.610	10.1%
Pegawai	2.655	10.3%
TNI	93	0.4%
Polri	96	0.4%
Pensiunan	628	2.4%
Swasta	1.151	4.4%
Tukang	657	2.5%
Jumlah	25.836	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Pademawu

Berdasarkan hasil pendataan keluarga sejahtera yang dilaksanakan oleh BKKBN Kecamatan Pademawu pada tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Klasifikasi Keluarga Sejahtera

No.	Desa	Pra KS		KS I		KS II	KS III	KS III Plus	Jumlah
		Ek.	Non-Ek.	Ek.	Non-Ek.				
1.	Pademawu Barat	229	144	149	136	366	204	51	1.342
2.	Pademawu Timur	439	582	120	27	366	120	58	1.712
3.	Bunder	216	30	630	65	195	146	2	684
4.	Tanjung	188	242	209	328	174	48	12	1.201
5.	Padelegan	44	52	49	136	301	127	23	732
6.	Majungan	249	97	27	100	29	8	6	516
7.	Pagagan	46	221	1	201	49	57	-	575
8.	Baddurih	163	91	72	45	28	8	8	415
9.	Jarin	301	539	99	241	15	4	-	1.199
10.	Rekbun	47	53	34	-	88	10	13	245
11.	Sopa'ah	45	20	17	68	-	115	7	292
12.	Buddih	45	76	48	70	22	16	1	278
13.	Durbuk	155	112	106	106	64	36	11	589
14.	Sumedangan	145	163	29	122	126	204	30	818
15.	Murtajih	307	231	91	320	78	180	30	1.237
16.	Buddagan	91	73	60	44	210	252	57	787
17.	Lemper	42	75	76	82	188	65	14	542
18.	Barurambat Timur	109	140	50	177	350	209	78	1.113
19.	Lawangan Daya	152	302	4	105	28	577	97	1.265
20.	Sentol	85	124	1	162	184	139	11	706
21.	Tambung	61	144	2	138	60	143	-	548
22.	Dasok	159	234	6	241	68	187	64	959
Jumlah		3.381	3.745	1.279	2.934	2.989	2.855	573	17.756
Prosentase		19.0	21.1	7.2	16.5	16.8	16.1	3.3	100

Sumber: Kantor BKKBN Kecamatan Pademawu

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Pademawu sebagian besar masih terbelenggu dalam kemiskinan, baik secara ekonomi maupun non ekonomi. Keluarga yang tergolong miskin di kecamatan ini sebanyak 63,8% yang terdiri dari Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I masing-masing sebesar 40,1% dan 23,7%. Sedangkan keluarga yang sudah tidak lagi digolongkan keluarga miskin yakni Keluarga Sejahtera II, III, dan III Plus masing-masing sebesar 16,8%, 16,1%, dan 3,3%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Pademawu hidup di bawah garis kemiskinan.

5.1.2. Deskripsi Responden Penelitian

5.1.2.1. Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Responden penelitian yang terdiri atas keluarga petani, pedagang, dan nelayan ini berusia antara 30 tahun sampai dengan 59 tahun yang dapat dilihat lebih rinci dalam tabel berikut:

Tabel 5.8 Jumlah responden berdasarkan kelompok umur

Kategori Kelompok Umur	f	%
30-34	10	11.1
35-39	19	21.1
40-44	22	24.4
45-49	22	24.4
50-54	14	15.6
55-59	3	3.4
Jumlah	90	100

Tabel 5.8 di atas menunjukkan bahwa usia responden pada umumnya berada pada usia 40 sampai dengan 49 tahun yaitu sebanyak 44 keluarga atau sebesar 48,8%. Sedangkan responden pada usia 35 samapi dengan 39 tahun sebanyak 19 keluarga atau 21,1%. Jumlah responden terkecil terdapat pada kelompok umum 55 sampai dengan 59 tahun yakni sebanyak 3 responden atau 3,4%.

5.1.2.2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dilihat dari jenis kelamin responden, terbanyak adalah laki-laki yakni sebanyak 84 responden atau sebesar 93,3%. Sedangkan responden pada kelompok wanita sebanyak 6 responden atau 6,7%. Hal ini dimaklumi karena pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah kepala keluarga.

Tabel 5.9 Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	f	%
Laki-laki	84	93.3
Perempuan	6	6.7
Jumlah	90	100

5.1.2.3. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan

Berdasarkan jenis pendidikan responden yang ditempuh pada saat mengenyam pendidikan di sekolah menengah atas, dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.10 Jumlah responden berdasarkan jenis pendidikan

Pendidikan	f	%
Menengah Umum	56	62.2
Menengah kejuruan	34	37.8
Jumlah	90	100

Jumlah responden yang berpendidikan menengah umum sebanyak 56 responden atau 62,2%, sedangkan yang berpendidikan menengah kejuruan sebesar 34 responden atau 37,8%.

5.1.2.4. Jumlah Responden Berdasarkan Pendapatan

Dilihat dari pendapatan rata-rata per bulan, pada umumnya responden berpenghasilan di bawah satu juta setiap bulannya yakni sebanyak 60 responden atau 66,7%. Yang berpenghasilan pada kisaran satu juta sampai lima juta terdapat 29 responden atau sekitar 32,2%. Sedangkan yang berpenghasilan lima jutaan ke atas hanya terdapat 1 responden (1,1%) yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.11 Jumlah responden berdasarkan pendapatan

Kategori Pendapatan	f	%
250.000 - < 1.000.000	60	66.7
1.000.000 - < 5.000.000	29	32.2
5.000.000 - > 5.000.000	1	1.1
Jumlah	90	100

5.1.2.5. Jumlah Responden Berdasarkan Tanggungan Anak

Berdasarkan besarnya tanggungan anak responden dapat dilihat pada tabel

5.12 berikut:

Tabel 5.12 Jumlah responden berdasarkan tanggungan anak

Jumlah anak	f	%
Tidak punya	9	12.2
1	4	7.8
2	33	38.9
3	14	17.8
4	8	11.1
lebih dari 4	9	12.2
Jumlah	90	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tanggungan anak terbesar yakni 2 anak. Pada kelompok ini terdapat 33 responden atau 38,9% disusul kemudian dengan jumlah anak 3 orang yaitu sebesar 14 responden atau 17,8%. Sedangkan responden yang mempunyai tanggungan anak lebih dari 4 orang, sama besarnya dengan responden yang tidak atau belum mempunyai tanggungan anak yaitu 9 responden atau 12,2%. Jumlah responden dengan tanggungan anak 4 orang sebesar 8 responden (11,1%) dan jumlah responden paling sedikit terdapat pada kelompok responden yang mempunyai tanggungan anak 1 orang yaitu sebanyak 4 responden (7,8%).

5.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

5.2.1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari item-item yang diajukan kepada 30 responden sebelum dilakukan penelitian yakni dengan menggunakan metode dengan uji *product moment*. Jika nilai r hitung $>$ r tabel maka item tersebut valid.

Tabel 5.13 Hasil Uji Validitas

Item	Nilai r hitung	r tabel	Keterangan
1	0.5050	0.352	Valid
2	0.6654	0.352	Valid
3	0.6956	0.352	Valid
4	0.5994	0.352	Valid
5	0.6233	0.352	Valid
6	0.5994	0.352	Valid
7	0.4454	0.352	Valid
8	0.6752	0.352	Valid
9	0.3903	0.352	Valid
10	0.4870	0.352	Valid
11	0.4446	0.352	Valid
12	0.5743	0.352	Valid
13	0.8287	0.352	Valid
14	0.6274	0.352	Valid
15	0.5677	0.352	Valid
16	0.7073	0.352	Valid
17	0.4610	0.352	Valid
18	0.6382	0.352	Valid
19	0.4489	0.352	Valid
20	0.8382	0.352	Valid
21	0.8533	0.352	Valid
22	0.8010	0.352	Valid
23	0.3975	0.352	Valid

5.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas (keandalan) alat ukur dengan menggunakan Teknik Reliabilitas Alpha Cronbach dilakukan terhadap item-item yang valid. Jika nilai alpha hitung lebih besar dari 0.6 maka alat ukur di atas reliabel. Dari perhitungan item-item pertanyaan kesejahteraan diperoleh reliabilitas alpha sebesar 0.9307. karena α hitung $>$ 0.6 maka alat ukur di atas reliabel.

5.3. Analisis Hasil Penelitian

5.3.1. Hasil Uji Eksak Fisher

A. Hubungan Antara Pendidikan dengan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani

Tabel 5.14 Hasil Uji Eksak Fisher Hubungan Antara Pendidikan Dengan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani

			Pendidikan Petani		Total
			Umum	Kejuruan	
Tingkat Kesejahteraan Petani	Sejahtera III	Jumlah	18	8	26
		Prosentase	60.0%	26.7%	86.7%
	Sejahtera III Plus	Jumlah	0	4	4
		Prosentase	0%	13.3%	13.3%
Total		Jumlah	18	12	30
		Prosentase	60.0%	40.0%	100.0%

Dari hasil pengujian statistik dengan menggunakan uji Eksak Fisher diperoleh nilai sebesar 4,339 dengan tingkat signifikansi 0.018 ($p < 0.05$). Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka dengan demikian ada hubungan antara pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga petani atau dengan kata lain H_1 diterima, H_0 ditolak.

Pada keluarga petani yang berpendidikan umum ada sekitar 18% yang termasuk Keluarga Sejahtera III dan tak satu pun keluarga petani dalam kelompok ini masuk dalam kategori Keluarga III Plus. Berbeda dengan keluarga yang berpendidikan menengah kejuruan, pada kelompok ini sebanyak 4% termasuk dalam Keluarga Sejahtera III Plus. Sedangkan 26,7% termasuk Keluarga Sejahtera III. Dilihat dari komposisi di atas, keluarga petani yang berpendidikan menengah kejuruan lebih banyak menduduki posisi keluarga yang lebih sejahtera dibandingkan kelompok yang berpendidikan umum.

B. Hubungan Antara Pendidikan dengan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pedagang

Tabel 5.15 Hasil Uji Eksak Fisher Hubungan Antara Pendidikan Dengan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pedagang

		Pendidikan Pedagang		Total	
		Umum	Kejuruan		
Tingkat Kesejahteraan Pedagang	Sejahtera III	Jumlah	15	2	17
		Prosentase	50.0%	6.7%	56.7%
	Sejahtera III Plus	Jumlah	3	10	13
		Prosentase	10.0%	33.3%	43.3%
Total	Jumlah	18	12	30	
	Prosentase	60.0%	40.0%	100.0%	

Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan menggunakan uji Eksak Fisher diperoleh nilai sebesar 10.458 dengan tingkat signifikansi 0.001 ($p < 0.05$). Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 dengan demikian maka ada hubungan antara pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga pedagang atau dengan kata lain H_1 diterima, H_0 ditolak.

Dari komposisi Keluarga Sejahtera, pada keluarga pedagang yang berpendidikan menengah kejuruan 10 responden termasuk pada Keluarga Sejahtera III Plus, sedangkan 2 keluarga termasuk pada Keluarga Sejahtera III. Pada Kelompok keluarga berpendidikan menengah umum, 3 keluarga termasuk Keluarga Sejahtera III Plus, 15 keluarga termasuk Keluarga Sejahtera III.

C. Hubungan Antara Pendidikan dengan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Nelayan

Tabel 5.16 Hasil uji Eksak Fisher Hubungan Antara Pendidikan Dengan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Nelayan

		Pendidikan Nelayan		Total	
		Umum	Kejuruan		
Tingkat Kesejahteraan Nelayan	Sejahtera III	Jumlah	19	6	25
		Prosentase	63,3%	20,0%	83,3%
	Sejahtera III Plus	Jumlah	1	4	5
		Prosentase	3,3%	13,3%	16,7%
Total	Jumlah	20	10	30	
	Prosentase	60,0%	40,0%	100,0%	

Pada keluarga nelayan hasil penelitian ini, keluarga yang ada dalam kelompok pendidikan kejuruan, lebih banyak menduduki posisi Keluarga Sejahtera III Plus yakni sebanyak 4 keluarga dibanding dengan keluarga dari kelompok pendidikan umum yang berjumlah 1 keluarga. Sebaliknya keluarga pada kelompok pendidikan umum lebih banyak ada pada tingkatan Keluarga Sejahtera III yakni sebanyak 19 responden, sedangkan pada kelompok kejuruan sebanyak 6 responden.

Hasil pengujian statistik yang menggunakan uji eksak fisher di atas diperoleh nilai sebesar 3,630 dengan tingkat signifikansi 0.031 ($p < 0.05$). Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka dapat dikatakan ada hubungan antara

pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga nelayan atau dengan kata lain H_1 diterima, H_0 ditolak.

5.3.2. Hasil Uji Mann-Whitney

Tabel 5.17 Hasil uji Mann-Whitney tentang perbedaan tingkat kesejahteraan keluarga kepala keluarga yang berpendidikan menengah umum dan yang berpendidikan menengah kejuruan

Jenis Pendidikan		N	Rata-rata Peringkat	Jumlah Peringkat
Tingkat Kesejahteraan	Sekolah Umum	56	37.18	2082.00
	Sekolah Kejuruan	34	59.21	2013.00
Total		90		

Dari hasil pengujian statistik dengan menggunakan uji Mann-Whitney diperoleh tingkat signifikansi 0.00 ($p < 0.05$). Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan antara keluarga dengan kepala keluarga yang berpendidikan menengah umum dan yang berpendidikan menengah kejuruan.

Untuk mengetahui keluarga yang lebih sejahtera antara yang berpendidikan menengah umum dan yang berpendidikan menengah kejuruan dapat dilihat dari *mean rank* atau rata-rata peringkatnya. Dalam tabel terlihat bahwa rata-rata peringkat kelompok pendidikan menengah kejuruan lebih besar daripada kelompok pendidikan menengah umum yakni $59.21 > 37.18$, dengan kata lain bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Ini berarti bahwa tingkat kesejahteraan keluarga dengan kepala keluarga

berpendidikan menengah kejuruan lebih sejahtera dibanding keluarga dengan kepala keluarga yang berpendidikan menengah umum.

5.4. Pengetahuan dan Keterampilan Petani, Pedagang, dan Nelayan

Dari mana para petani, pedagang, dan nelayan memperoleh pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pekerjaan yang digeluti saat ini, apakah secara khusus diperoleh dari sekolah saat menempuh pendidikan menengah, pelatihan ataukah hanya dari orang tua mereka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.18 Tabel Sumber Pengetahuan dan Keterampilan Responden

Sumber Perolehan Pengetahuan	f	%
- Orang tua	39	43.3
- Sekolah	4	4.5
- Pelatihan	-	0.0
- Orang Tua, Sekolah dan Pelatihan	17	18.9
- Orang Tua dan Sekolah	6	6.7
- Orang Tua dan Pelatihan	22	24.4
- Sekolah dan Pelatihan	2	2.2
Jumlah	90	100

Untuk mengetahui perbedaan sumber pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh antara kelompok pendidikan menengah umum dan kelompok pendidikan menengah kejuruan dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut:

Tabel 5.19 Tabel Perbandingan Sumber Pengetahuan dan Keterampilan Responden

Sumber Perolehan Pengetahuan	Umum		Kejuruan	
	f	%	f	%
- Orang tua	39	69.6	-	0.0
- Sekolah	-	0.0	4	11.8
- Pelatihan	-	0.0	-	0.0
- Orang Tua, Sekolah dan Pelatihan	-	0.0	17	50.0
- Orang Tua dan Sekolah	-	0.0	6	17.6
- Orang Tua dan Pelatihan	17	30.4	5	14.7
- Sekolah dan Pelatihan	-	0.0	2	5.9
	56	100	34	100

Pekerjaan responden pada umumnya adalah pekerjaan yang dilakukan secara turun temurun mulai generasi sebelum mereka. Orang tua, kakek, dan seterusnya mempunyai pekerjaan yang sejenis. Jika pekerjaan responden nelayan, hampir bisa dipastikan bahwa pekerjaan orang tua responden tersebut adalah nelayan. Demikian pula halnya mereka yang berprofesi sebagai petani dan pedagang, umumnya orang tua mereka adalah berprofesi seperti itu.

Oleh karena profesi yang digeluti oleh sebagian besar responden dilakukan secara turun temurun maka responden mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini adalah dari orang tua mereka. Selain mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari orang tua mereka, responden juga memperolehnya dari sekolah saat menempuh pendidikan menengah ataupun pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas terkait.

Pada kelompok pendidikan menengah umum sebagian besar atau tepatnya 69,6% mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pekerjaan yang mereka geluti saat ini hanya dari orang tua mereka saja. Sedangkan selebihnya,

30,4% selain dari orang tua mereka, sumber pengetahuan dan keterampilan mereka didapat dari pelatihan. Pelatihan yang dimaksud di sini adalah penyuluhan, misalnya penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan sebagainya. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kelompok ini, pekerjaan yang mereka geluti terkait dengan pekerjaan orang tua mereka, artinya secara turun temurun mereka melakukan pekerjaan yang mereka geluti saat ini. Jika orang tua responden berprofesi sebagai petani, responden juga berprofesi sebagai petani. Demikian pula halnya dengan yang berprofesi sebagai pedagang maupun nelayan.

Berbeda dengan kelompok yang berpendidikan menengah umum, tidak semua responden dari kelompok yang berpendidikan menengah kejuruan menekuni pekerjaan mereka karena mengikuti orang tua mereka. Setidaknya terdapat 6 responden (17,7%) yang bekerja berbeda dengan pekerjaan orang tua mereka, walaupun sebagian besar yakni 82,3% responden bekerja mengikuti jejak orang tua mereka.

Satu hal lagi yang membedakan antara dua kelompok pendidikan menengah di atas yakni kelompok pendidikan kejuruan, selain mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari orang tua mereka, responden juga memperolehnya dari lembaga pendidikan pada saat mereka menempuh pendidikan menengah. Di Sekolah Menengah Kejuruan memang diberikan materi khusus sesuai dengan jurusannya masing-masing.

Berkenaan dengan apakah para responden dari kelompok ini merasa cukup dengan bekal pengetahuan yang didapat di sekolah menengah atau tidak, sebagian

besar responden menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dari sekolah menengah ternyata tidak cukup menunjang pekerjaan yang digeluti saat ini. Alasan tidak mencukupinya bekal pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan di sekolah menengah disebabkan karena pengetahuan yang didapat ternyata kurang atau tidak memadai sebab apa yang diajarkan tidak sama dengan yang dihadapi pada kehidupan sehari-hari.

Merasa bahwa pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan selama ini kurang memadai dengan apa yang dibutuhkan, para responden menyatakan bahwa saat ini masih merasa perlu untuk mendapatkan tambahan pengetahuan guna mendukung pekerjaannya. Hal ini nantinya diharapkan dapat lebih menguntungkan bagi mereka karena akan menunjang pekerjaan mereka.

Responden memanfaatkan ilmu yang didapat dalam menunjang pekerjaan yang digeluti saat ini dengan cara menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya itu ke dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Sebagaimana contoh berikut; Zainal, 43 tahun, responden yang berprofesi sebagai pedagang menerapkan ilmunya dengan mencatat kegiatan perdagangannya ke dalam catatan pembukuan sederhana, sebagaimana yang diperolehnya saat menempuh pendidikan menengah kejuruan (SMEA). Beliau mengatakan bahwa dengan pencatatan keuangan, walaupun secara sederhana, dapat membuat pekerjaannya lebih teratur. Antara pendapatan dan pengeluaran jelas tercatat dalam buku catatannya, sehingga dengan demikian beliau dapat dengan mudah mengetahui keuntungan yang diperolehnya.

Dengan bekal pendidikannya di STM, Bapak Hanafi, 40 tahun, seorang nelayan merekayasa alat penggerak mesin yang menggerakkan perahunya agar lebih irit menggunakan bahan bakar. Diakuinya bahwa dengan ilmu yang didapatkan dari STM (jurusan mesin) sewaktu sekolah dulu, beliau dapat mengerjakan hal tersebut. Dengan perekayasaan itu, ia mengatakan bisa lebih menghemat pengeluaran untuk membeli bahan bakar guna menjalankan perahu mesinnya.





BAB VI

PEMBAHASAN HASIL ANALISIS

BAB 6

PEMBAHASAN HASIL ANALISIS

6.1. Hubungan Antara Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan dengan Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada bagian terdahulu membuktikan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan menengah umum dan kejuruan dengan tingkat kesejahteraan keluarga, baik keluarga petani, pedagang, maupun keluarga nelayan. Dengan uji Eksak Fisher pada masing-masing kelompok keluarga, tingkat signifikansi yang diperoleh $< 0,05$. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka dengan demikian ada hubungan antara pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga petani, pedagang, dan nelayan atau dengan kata lain H_1 diterima, H_0 ditolak.

Tingkat signifikansi pada kelompok keluarga petani 0.018 dengan nilai sebesar 4,339. Pada kelompok keluarga petani ini, 18% yang berpendidikan umum termasuk Keluarga Sejahtera III dan tak satu pun keluarga petani dalam kelompok ini masuk dalam kategori Keluarga III Plus. Hal ini berbeda dengan keluarga yang berpendidikan menengah kejuruan, pada kelompok ini sebanyak 4% termasuk dalam Keluarga Sejahtera III Plus. Sedangkan 26,7% termasuk Keluarga Sejahtera III. Dilihat dari komposisi di atas, keluarga petani yang berpendidikan menengah

kejuruan lebih banyak menduduki posisi keluarga yang lebih sejahtera dibandingkan kelompok yang berpendidikan umum.

Pada kelompok keluarga pedagang, diperoleh nilai sebesar 10.458 dengan tingkat signifikansinya 0.001. Dari hasil pengujian statistik diketahui keluarga pedagang yang berpendidikan menengah kejuruan 10 responden termasuk pada Keluarga Sejahtera III Plus, sedangkan 2 keluarga termasuk pada Keluarga Sejahtera III. Pada Kelompok keluarga berpendidikan menengah umum, 3 keluarga termasuk Keluarga Sejahtera III Plus, 15 keluarga termasuk Keluarga Sejahtera III.

Sedangkan pada keluarga nelayan hasil penelitian ini, keluarga yang berada dalam kelompok pendidikan kejuruan, lebih banyak menduduki posisi Keluarga Sejahtera III Plus yakni sebanyak 4 keluarga dibanding dengan keluarga dari kelompok pendidikan umum yang berjumlah 1 keluarga. Sebaliknya keluarga pada kelompok pendidikan umum lebih banyak ada pada tingkatan Keluarga Sejahtera III yakni sebanyak 19 responden, sedangkan pada kelompok kejuruan sebanyak 6 responden. Hasil pengujian statistik yang menggunakan uji Eksak Fisher diperoleh nilai sebesar 3,630 dengan tingkat signifikansi 0.031 ($p < 0.05$).

Dengan demikian, berdasarkan hasil uji Eksak Fisher yang diperoleh tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0.05 pada masing-masing kelompok keluarga, maka dapat dikatakan ada hubungan antara pendidikan menengah umum dan kejuruan dengan tingkat kesejahteraan keluarga nelayan atau dengan kata lain H_1 diterima, H_0 ditolak.

6.2. Perbedaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Antara Kelompok Keluarga yang Berpendidikan Umum dan Kejuruan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan antara kelompok keluarga yang berpendidikan menengah umum dengan kelompok keluarga yang berpendidikan menengah kejuruan. Dari hasil pengujian statistik dengan menggunakan uji Mann-Whitney diperoleh tingkat signifikansi 0.00 ($p < 0.05$). Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan antara keluarga dengan kepala keluarga yang berpendidikan menengah umum dan yang berpendidikan menengah kejuruan.

Untuk mengetahui keluarga yang lebih sejahtera antara yang berpendidikan menengah umum dan yang berpendidikan menengah kejuruan dapat dilihat dari *mean rank* atau rata-rata peringkatnya. Dalam tabel terlihat bahwa *mean rank* atau rata-rata peringkat kelompok pendidikan menengah kejuruan lebih besar daripada kelompok pendidikan menengah umum yakni $59.21 > 37.18$, dengan kata lain bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Ini berarti bahwa tingkat kesejahteraan keluarga dengan kepala keluarga berpendidikan menengah kejuruan lebih sejahtera dibanding keluarga dengan kepala keluarga yang berpendidikan menengah umum. Dari hasil pengolahan data sebelumnya juga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga pada kelompok pendidikan kejuruan ternyata lebih banyak daripada tingkat kesejahteraan keluarga pada kelompok pendidikan umum.

Dari 56 responden dari kelompok pendidikan umum, baik dari keluarga petani, pedagang, dan nelayan, sebanyak 4 atau 7,1% keluarga responden termasuk pada tingkatan Keluarga Sejahtera III, selebihnya 52 (92,9%) keluarga responden termasuk pada tingkatan Keluarga Sejahtera III Plus. Sedangkan pada kelompok pendidikan kejuruan yang berjumlah 34 responden, keluarga yang berada pada tingkatan Keluarga Sejahtera III sebanyak 16 atau 47,1% keluarga responden dan 18 (52,9%) keluarga responden termasuk pada tingkatan Keluarga III Plus.

6.3. Pengetahuan dan Keterampilan Dalam Menunjang Pekerjaan

Profesi sebagian besar dari responden, baik sebagai petani, pedagang, maupun nelayan merupakan pekerjaan yang ditekuni karena warisan orang tua. Jika mereka menjadi petani bisa dipastikan bahwa orang tua mereka adalah petani juga. Demikian pula halnya pada mereka yang berprofesi sebagai pedagang dan nelayan, mereka mengikuti jejak langkah orang tua mereka sebagai pedagang dan nelayan. Hanya sedikit saja yang tidak mengikuti profesi orang tua mereka. Dengan demikian pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan pada umumnya didapatkan dari orang tua mereka, baik dari kelompok yang berpendidikan menengah umum maupun yang berpendidikan menengah kejuruan. Yang membedakan antara kedua kelompok tersebut adalah bahwa pada kelompok dari pendidikan menengah umum tidak pernah secara khusus memperoleh pengetahuan dan keterampilannya dari bangku pendidikan. Kalaupun ada yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara khusus terkait dengan pekerjaannya, mereka memperolehnya dari pelatihan atau

penyuluhan yang dilakukan oleh instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Perikanan, dan sebagainya. Pada kelompok yang berpendidikan menengah kejuruan, secara khusus telah memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pekerjaan mereka itu ketika mengenyam pendidikan pada tingkat pendidikan menengah atas walaupun apa yang didapatkan belum secara maksimal dapat membantu menunjang pekerjaan mereka. Hal ini disebabkan karena apa yang didapatkan di sekolah atau lembaga pendidikan berbeda dengan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Walaupun para petani, pedagang, dan nelayan merasa belum cukup dalam menerima pengetahuan dan keterampilan yang didupatkannya, mereka tetap mememanfaatkannya dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan itu dalam mendukung pekerjaannya.



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat hubungan antara pendidikan menengah umum dan kejuruan dengan tingkat kesejahteraan keluarga petani, pedagang, dan nelayan di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini **diterima**.
2. Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan antara kelompok keluarga yang berpendidikan menengah umum dan kelompok keluarga yang berpendidikan menengah kejuruan. Hasil uji Mann-Whitney membuktikan bahwa kesejahteraan kelompok keluarga yang berpendidikan menengah kejuruan lebih sejahtera dibandingkan dengan kelompok keluarga yang berpendidikan menengah umum. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini **diterima**.
3. Sebagian besar profesi petani, pedagang, maupun nelayan adalah pekerjaan yang dilakukan secara turun temurun dari orang tua mereka sehingga pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebagian besar adalah dari orang tua mereka. Pada kelompok yang berpendidikan kejuruan, mendapatkan pendidikan secara khusus dalam pendidikan formalnya dibandingkan kelompok yang berpendidikan umum.

4. Dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya dalam mendukung pekerjaannya, para petani, pedagang, dan nelayan menerapkan apa yang telah diperolehnya itu ke dalam pekerjaan mereka, walaupun pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya dirasa belum mencukupi dalam mendukung pekerjaan mereka.

7.2. Saran

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa secara umum kelompok keluarga yang berpendidikan menengah kejuruan lebih sejahtera daripada kelompok keluarga yang berpendidikan menengah kejuruan. Dari kenyataan yang ada di lapangan, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya pengetahuan dan keterampilan dalam menunjang pekerjaan, maka perlu kiranya diupayakan pembinaan pengetahuan dan keterampilan kepada para keluarga agar dapat menjadi nilai tambah bagi keluarga itu yang nantinya dapat akan bermanfaat untuk menunjang pekerjaan keluarga.
2. Terkait dengan pentingnya pengetahuan dan keterampilan dalam menunjang pekerjaan, perlu didirikan sekolah menengah kejuruan yang benar-benar dibutuhkan di daerah tersebut, misalnya sekolah menengah kejuruan dengan konsentrasi pendidikan pertanian, pemberdayaan budj daya laut, dan sebagainya.
3. Perlunya penyuluhan terkait dengan pekerjaan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bisa dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) Pusat, 1999. *Garis-garis Besar Haluan Negara*.
- Beeby, 1974. *Assment of Indonesia Education*. Wellington, New Zealand Council for Education Research.
- Bernas, 1997. *273.653 ha Areal Persawahan Hilang, 21 Maret 1997*. Yogyakarta.
- Biro Pusat Statistik, 1994, 1999. *Biro Pusat Statistik*. Jakarta.
- BKKBN Jakarta, 1993. *Bunga Rampai Pembangunan Keluarga Sejahtera*.
- BPS, 2000, *Indikator Kesejahteraan Rakyat (Welfare Indicators)*. Jakarta.
- BPS Kabupaten Pamekasan, 2001. *Kabupaten Pamekasan Dalam Angka (Pamekasan Regency in Figures) 2000*. Pamekasan
- Booth, 1991. *Regional Aspects of Indonesian Agricultural Growth*, in Joan Hardjono (Ed). *Indonesia: Resources, Ecology and Environment*. Singapore: Oxford University Press.
- Dwiatmoko, Haryo P dan Edhie Djatmiko, 1994. *Kemiskinan dan Keswadayaan di Desa Jenar*, dalam Mubyarto, dkk.: *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Faisal, Sanapiah, 2001. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gayatri, Ni Putu G., 1995. *Bina Pengetahuan Gerakan KB dan KB Nasional*. Jakarta: Kantor Menteri Negara dan Kependudukan.
- Hadi, Sutrisno, 1994. *Statistik 2*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haryanto, Rohadi dan Tamrin Amal Tomagola, 1997. *Indikator Keluarga Sejahtera: Instrumen Pemantau Keberdayaan Keluarga Untuk Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Jurnal Sosiologi Indonesia No. 2/1997.

- Idris, Zahara, 1984. *Dasar-dasar Kependidikan*. Bandung: Aksara.
- Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1996. *Panduan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1996. *Opini Pembangunan Keluarga Sejahtera*.
- Karabel, J. dan A.H. Halsey (ed), 1978. *Power and Ideology in Education*. New York: Oxford University Press.
- Lerner, Daniel, 1980. *Memudarnya Masyarakat Tradisional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muslich, Masnur, 1994. *Dasar-dasar Pemahaman Kurikulum 1994*. Malang: IKIP.
- Purwanto, M. Ngalim, 2000. *Ilmu Pendidikan: Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Sastraatmadja, Endang, 1986. *Indikator-indikator Perekonomian Indonesia*. Bandung: Amrico.
- Sedarmayanti, 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: PT Mandar Maju.
- Singarimbun, M. dan Effendi S., 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Soemardjan, Selo, 1994. *Mengarah Kepada Program Investasi Keluarga Sejahtera*. Makalah tidak diterbitkan: Jakarta.
- Soetjipto, 1992. *Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*. Semarang: Satya Wacana.
- Sunanto, Hatta, 1998. *Petani Sayang, Petaniku Malang*. Bernas 18 Pebruari 1998, Yogyakarta.
- Surakhmad, Winarno, 1996. *Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskian*. BKKBN, Jakarta.
- Tilaar, H.A.R., 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Dosen IKIP Malang, 1990. *Dasar-dasar Kependidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.

Tim KKBS Propinsi Jawa Timur, 1994. *Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera Nasional di Jawa Timur*.

Tjokrowinoto, Moeljarto, 1995. *Konsep dan Issue Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Wirojoedo, Soebijanto, 1986. *Peranan Pendidikan Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional* Yogyakarta: Liberty.

http://www.pdk.go.id/publikasi/brief/94/94-95-sis_diknas.htm





LAMPIRAN

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
S1	16.4333	35.7023	.5050	.9291
S2	16.5333	34.4644	.6654	.9264
S3	16.3667	35.3437	.6956	.9265
S4	16.5333	34.8092	.5994	.9276
S5	16.4333	35.1506	.6233	.9272
S6	16.5333	34.8092	.5994	.9276
S7	16.4667	35.8437	.4454	.9301
S8	16.4000	35.1448	.6752	.9265
S9	16.4667	36.1195	.3903	.9310
S10	16.4667	35.6368	.4870	.9294
S11	16.6667	35.4023	.4446	.9307
S12	16.3667	35.8264	.5743	.9281
S13	16.4667	33.9816	.8287	.9237
S14	16.4667	34.9471	.6274	.9271
S15	16.6000	34.8000	.5677	.9282
S16	16.4000	35.0069	.7073	.9261
S17	16.6333	35.3437	.4610	.9303
S18	16.4333	35.0816	.6382	.9270
S19	16.6333	35.4126	.4489	.9305
S20	16.3333	35.1954	.8382	.9252
S21	16.4000	34.3862	.8533	.9239
S22	16.3667	34.9299	.8010	.9251
S23	16.7333	35.6506	.3975	.9316

Reliability Coefficients

N of Cases = 30.0

N of Items = 23

Alpha = .9307

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Tingkat kesejahteraan petani * Tingkat pendidikan petani	30	33.3%	60	66.7%	90	100.0%

Tingkat kesejahteraan petani * Tingkat pendidikan petani Crosstabulation

			Tingkat pendidikan petani		Total
			Umum	Kejuruan	
Tingkat kesejahteraan petani	Sejahtera III	Count	18	8	26
		Expected Count	15.6	10.4	26.0
		% of Total	60.0%	26.7%	86.7%
	Sejahtera III plus	Count	0	4	4
		Expected Count	2.4	1.6	4.0
		% of Total	.0%	13.3%	13.3%
Total	Count	18	12	30	
	Expected Count	18.0	12.0	30.0	
	% of Total	60.0%	40.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.923 ^b	1	.009		
Continuity Correction ^a	4.339	1	.037		
Likelihood Ratio	8.284	1	.004		
Fisher's Exact Test				.018	.018
Linear-by-Linear Association	6.692	1	.010		
N of Valid Cases	30				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.60.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Tingkat kesejahteraan pedagang * Tingkat pendidikan pedagang	30	33.3%	60	66.7%	90	100.0%

Tingkat kesejahteraan pedagang * Tingkat pendidikan pedagang Crosstabulation

			Tingkat pendidikan pedagang		Total
			Umum	Kejuruan	
Tingkat kesejahteraan pedagang	Sejahtera III	Count	15	2	17
		Expected Count	10.2	6.8	17.0
		% of Total	50.0%	6.7%	56.7%
	Sejahtera III plus	Count	3	10	13
		Expected Count	7.8	5.2	13.0
		% of Total	10.0%	33.3%	43.3%
Total	Count	18	12	30	
	Expected Count	18.0	12.0	30.0	
	% of Total	60.0%	40.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	13.032 ^b	1	.000		
Continuity Correction ^a	10.458	1	.001		
Likelihood Ratio	14.020	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.000
Linear-by-Linear Association	12.597	1	.000		
N of Valid Cases	30				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.20.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Tingkat kesejahteraan nelayan * Tingkat pendidikan nelayan	30	33.3%	60	66.7%	90	100.0%

Tingkat kesejahteraan nelayan * Tingkat pendidikan nelayan Crosstabulation

			Tingkat pendidikan nelayan		Total
			Umum	Kejuruan	
Tingkat kesejahteraan nelayan	Sejahtera III	Count	19	6	25
		Expected Count	16.7	8.3	25.0
		% of Total	63.3%	20.0%	83.3%
	Sejahtera III plus	Count	1	4	5
		Expected Count	3.3	1.7	5.0
		% of Total	3.3%	13.3%	16.7%
Total	Count	20	10	30	
	Expected Count	20.0	10.0	30.0	
	% of Total	66.7%	33.3%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.880 ^b	1	.015		
Continuity Correction ^a	3.630	1	.057		
Likelihood Ratio	5.633	1	.018		
Fisher's Exact Test				.031	.031
Linear-by-Linear Association	5.684	1	.017		
N of Valid Cases	30				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.67.

NPar Tests**Mann-Whitney Test****Ranks**

	Tingkat Pendidikan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Tingkat kesejahteraan	sekolah umum	56	37.18	2082.00
	sekolah kejuruan	34	59.21	2013.00
	Total	90		

Test Statistics^a

	Tingkat kesejahteraan
Mann-Whitney U	486.000
Wilcoxon W	2082.000
Z	-4.674
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Grouping Variable: Tingkat Pendidikan



2. Berapa besar pengeluaran yang dilakukan Bapak/Ibu/Sdr. setiap bulannya.
Rp. (dalam ribuan)
 - Makan : Rp.
 - Pakaian : Rp.
 - Kesehatan : Rp.
 - Pendidikan : Rp.
 - Tabungan : Rp.
 - Lain-lain sebutkan : Rp.

3. Bagaimana status kepemilikan rumah yang Bapak/Ibu/Sdr. miliki.
 - a. Milik sendiri
 - b. Milik keluarga
 - c. Milik saudara
 - d. Sewa
 - e. Kontrak
 - f. Numpang orang lain
 - g. Lainnya (sebutkan):

4. Bagaimana kondisi rumah yang dimiliki (pengamatan).
 - a. Bahan dinding terluas : 1. tembok/batu bata
2. papan/triplek
3. bambu
 - b. Bahan atap terluas : 1. genting
2. asbes/seng
3. lainnya (sebutkan):
 - c. Lantai terluas : 1. tegel
2. semen
3. tanah
4. lainnya (sebutkan):
 - d. Kondisi rumah : 1. ada ventilasi
2. ada kamar mandi
3. ada wc
 - e. Fasilitas : 1. listrik (diesel/PLN)
2. air/pompa air
3. lainnya (sebutkan):

5. Berapa luas bangunan rumah yang Bapak/Ibu/Sdr. miliki. m²

6. Apakah Bapak/Ibu/Sdr memiliki ternak:
 - a. Lembu : 1. Ya (jumlah:)
 - b. Kambing : 1. Ya (jumlah:)
 - c. Sapi : 1. Ya (jumlah:)
 - d. Ayam : 1. Ya (jumlah:)
 - e. Itik : 1. Ya (jumlah:)
 - f. Lainnya : (sebutkan.....)
 - 2. Tidak
 - 2. Tidak
 - 2. Tidak
 - 2. Tidak
 - 2. Tidak
 - (jumlah:)

7. Apakah Bapak/Ibu/Sdr memiliki barang-barang sebagai berikut:

Jenis Barang	Ya/Tidak	Jumlah
a. Radio
b. Radio-Tape
c. Jam dinding
d. Mesin jahit
e. Lampu minyak
f. Lampu petromak
g. Sepeda
h. Televisi
i. Sepeda motor
j. Video/VCD

III. PEMANFAATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN YANG DITERIMA DALAM BEKERJA

- Apakah Bapak/Ibu/Sdr. pernah memperoleh pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pekerjaan yang anda geluti saat ini?
 - Ya
 - Tidak
- Jika Ya, apakah Bapak/Ibu/Sdr. merasakan manfaat pengetahuan dan keterampilan yang diterima dalam menunjang pekerjaan Bapak/Ibu/Sdr.?
 - Ya
 - Tidak
- Dari manakah Bapak/Ibu/Sdr. memperoleh pengetahuan dan keterampilan tersebut?
 - Sekolah
 - Pelatihan/kursus
 - Orang Tua
- Apakah Bapak/Ibu/Sdr. memperoleh pengetahuan dan keterampilan pada saat menempuh pendidikan menengah atas?
 - Ya
 - Tidak
- Apakah Bapak/Ibu/Sdr. merasa cukup memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk menunjang pekerjaan yang digeluti saat ini?
 - Ya
 - Tidak
- Apakah Bapak/Ibu/Sdr. masih merasa perlu mendapatkan tambahan pengetahuan untuk mendukung pekerjaan saat ini?
 - Ya
 - Tidak
- Bagaimanakah Bapak/Ibu/Sdr. memanfaatkan ilmu yang didapat dalam menunjang pekerjaan yang digeluti?

.....

.....

IV. TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA

No.	Indikator	Ya	Tdk
1.	Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing anggota keluarga.		
2.	Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.		
3.	Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan untuk bepergian		
4.	Bagian yang terluas dari lantai bukan dari tanah.		
5.	Bila anak sakit dan atau pasangan usia subur (PUS) ingin ber-KB dibawa ke sarana atau petugas kesehatan serta diberi obat atau cara ber-KB modern.		
6.	Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.		
7.	Paling kurang sekali seminggu, keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk-pauk.		
8.	Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.		
9.	Luas lantai paling kurang 8 m ² untuk tiap penghuni rumah.		
10.	Seluruh anggota keluarga setiap tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing.		
11.	Paling kurang satu orang anggota keluarga usia 15 tahun ke atas berpenghasilan tetap.		
12.	Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin		
13.	Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.		
14.	Bila telah mempunyai 2 orang anak, keluarga yang masih PUS (pasangan usia subur) menggunakan alat kontrasepsi, kecuali sedang hamil.		
15.	Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.		
16.	Sebagian dari penghasilan keluarga disisihkan untuk tabungan keluarga.		
17.	Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sehari dalam sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.		
18.	Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.		
19.	Keluarga mengadakan rekreasi bersama atau penyegaran di luar rumah paling kurang sekali dalam 6 bulan.		
20.	Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar atau radio, televisi ataupun majalah.		
21.	Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.		
22.	Keluarga atau anggota keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk material.		
23.	Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.		